

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2006-2013**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**



**Disusun Oleh:
TARYOKO
12804241057**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2006-2013**

Oleh:

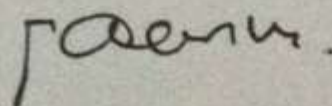
Taryoko

NIM. 12804241057

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan dan dipertahankan di
depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Maret 2016

Dosen Pembimbing



Maimun Sholeh, M. Si.

NIP. 19660606 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

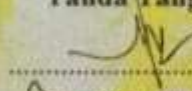
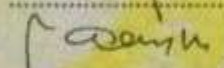
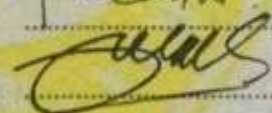
SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2006-2013

Oleh:
TARYOKO
NIM. 12804241057

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta pada 16 Maret 2016 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Suwarno, M. Pd.	Ketua Penguji		30/03-2016
Maimun Sholeh, M. Si.	Sekretaris		29/03-2016
Aula Ahmad HSF, M. Si.	Penguji Utama		24/03-2016

Yogyakarta, 31 Maret 2016

Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan



Dr. Sugiharsono, M. Si.

NIP. 19550328 198303 1 002/3

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taryoko

NIM : 12804241057

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2006-2013**

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan oleh orang lain, kecuali pada bagian tertentu saya ambil sebagai acuan. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 11 Maret 2016

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Taryoko', written over a light-colored background.

Taryoko

NIM. 12804241057

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka.”

(QS Ar Raad: 11)

“Masing-masing dari kita mempunyai mimpi, bangun dan raih mimpimu itu atau tetap tidur dan hidup dalam mimpimu.”

(Penulis)

“Don’t stop when you are tired, but stop when you are done.”

(NN)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk kalian...

Kedua orang tuaku, Bapa Sastro Sarno dan Mama Kalimah.

Kedua saudaraku, Bang Supriyadi dan Dek Finka Erlina Diasih.

Serta kamu yang selalu menemaniku, Dyah Ayu Anggraeni.

Untuk Indonesia-ku, semoga bermanfaat.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2006-2013**

**Oleh:
TARYOKO
NIM. 12804241057**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2006-2013. Penelitian ini menganalisis 4 variabel independen menggunakan data sekunder berupa data panel yang diperoleh dari *cross-section* 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan *time series* selama 8 tahun. Alat analisis yang digunakan berupa regresi data panel dengan *fixed effect model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) PDRB berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, 2) Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, 3) Jumlah Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, 4) Sumber Daya Alam berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, dan 5) Seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kata kunci: kemandirian keuangan daerah, PDRB, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, sumber daya alam

***ANALYSIS OF THE FACTORS THAT AFFECT FINANCIAL AUTONOMY
OF REGIONAL IN YOGYAKARTA SPECIAL TERRITORY IN THE PERIOD
2006-2013***

**TARYOKO
12804241057**

ABSTRACT

This study aims to analyze factors affecting financial autonomy of regional in Yogyakarta Special Territory in the periode 2006-2013. The study analyzed four independent variables using secondary data in the form of panel data with a cross-section in five regencies/cities in Yogyakarta Special Territory and a time series of eight years. The analysis was regression with a fixed effect model. The result of the study showed that: 1) Gross Regional Domestic Product (GRDP) had a positive effect on the financial autonomy of regional, 2) The Population had a positive effect on the financial autonomy of regional, 3) The Employment did not have a significant effect on the financial autonomy of regional, 4) Natural Resources had a positive effect on the financial autonomy of regional, and 5) All of independent variable had an effect on the dependent variable.

Keywords: financial autonomy of regional, GRDP, population, employment, natural resources

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2013” ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Sugiharsono, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian.
2. Tejo Nurseto, M. Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan layanan jurusan Pendidikan Ekonomi.
3. Daru Wahyuni, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses studi.
4. Maimun Sholeh, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi yang selalu sabar memberikan pembelajaran yang berharga dan bimbingan dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini.
5. Aula Ahmad HSF, M. Si., selaku Narasumber yang telah memberikan arahan dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Suwarno, M. Pd., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan saran yang lebih baik dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama proses studi.
8. Pak Dating Sudrajat, selaku Admin Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan pelayanan jurusan yang sangat T-O-P.

9. HIMA Pendidikan Ekonomi 2013-2014 dan DPM Fakultas Ekonomi 2015 yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga yang tidak didapatkan di bangku kuliah.
10. Sahabat BSCM, Bang Ali, Berta, Ikhsan, Arip, Fian, Sebo, Kabul, Yulhan, Satrio, Daniel, Tri, Yusron, dan Harno.
11. Enumerator Bank Indonesia, Mbak Heni, Mas Rais, Mbak Riska, Mbak Alfi, Mbak Arum, Mbak Novia, Mbak Ruli, Mbak Hesty, Ayu, Dian, dan Ervin.
12. Tim Generasi Cerdas Keuangan, Mbak Eka, Ilyana, Candra, Desi, Dwi, Maizura, dan Umi.
13. Sahabat “The Canceled” Beswan Djarum 30 UNY, Olla, Rosyid, Andin, dan Novita.
14. Sahabat PENNOMIKA 2012 tanpa terkecuali.
15. Sahabat-sahabatku, Aan, Ucup, Himatul, Retno, Umi Alma, Lintang, Bu Desi, Intan, Santi, Ratna, Fenti, Oliv, dan Ilham.
16. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam studi hingga terselesaikannya Tugas Akhir Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga bantuan dan dukungan baik yang bersifat moral maupun material dari berbagai pihak tersebut dapat menjadi ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga Tugas Akhir Skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 11 Maret 2016
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Taryoko', with a horizontal line underneath.

Taryoko
NIM. 12804241057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Teori	12
1. Laporan Keuangan Pemerintah.....	12
2. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17
3. Kemandirian Keuangan Daerah	19
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah ...	22
B. Penelitian Sebelumnya.....	28
C. Kerangka Berpikir	31
D. Hipotesis Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Desain Penelitian	36
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian	36
1. Variabel Dependen.....	36
2. Variabel Independen	37
C. Data dan Jenis Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data	39
1. Analisis Regresi Data Panel.....	39
2. Uji Spesifikasi Model	41
3. Uji Asumsi Klasik.....	43
4. Uji Signifikansi	45

BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta	47
B. Deskripsi Data Penelitian	55
C. Analisis Data.....	57
1. Penentuan Teknik Analisis Model Data Panel.....	57
2. Hasil Uji Asumsi Klasik	58
3. Analisis Data Panel	62
D. Hasil Uji Signifikansi	62
E. Pembahasan Hasil Penelitian	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Keterbatasan Penelitian	71
C. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di DIY tahun 2006-2013.....	5
2. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	20
3. Kriteria Pengujian Durbin Watson	45
4. Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Luas Daerah di DIY	48
5. Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu.....	53
6. Klasifikasi Penggunaan Lahan Menurut Kabupaten/Kota di DIY	55
7. Stastistik Deskriptif	56
8. Hasil Uji Chow	57
9. Hasil Uji Hausman	58
10. Hasil Uji Multikolinearitas	60
11. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	61
12. Hasil Estimasi Model	62
13. Hasil Uji Koefisien Determinasi	63
14. Distribusi Persentase PDRB DIY Tahun 2006-2013	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Berpikir	34
2. Peta Daerah Istimewa Yogyakarta	47
3. PDRB Menurut Kabupaten/Kota di DIY 2006-2013	51
4. Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota di DIY 2006-2013.....	52
5. Hasil Uji Normalitas.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi fiskal mulai dilaksanakan sejak Januari 2001 sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Pemberlakuan kebijakan tersebut memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi pengeluaran, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah mampu menghasilkan kesejahteraan masyarakat paling optimal. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah dianggap lebih memahami kondisi dan kebutuhan daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintah pusat, sehingga diharapkan dana yang dibelanjakan lebih mengenai sasaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Setiap daerah memiliki potensi yang beragam dan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Potensi daerah tersebut misalnya

potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangan daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah dan juga pembangunan daerah. Kemampuan mengenali potensi daerah yang beragam ini tidak dapat ditangani sendiri oleh salah satu pihak saja (pemerintah pusat). Kewenangan fiskal pemerintah daerah inilah yang menjadikan daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Hal ini memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang merupakan kekayaan daerah miliknya menjadi semakin lebar.

Suprpto (2006) menyatakan bahwa setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kewajiban tersebut dapat terpenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya keuangan secara optimal. Pengelolaan keuangan daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Keberhasilan pengelolaan potensi daerah tersebut dapat diukur dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang

bersangkutan. Halacmi (2005) dalam Darmanto (2012) menyatakan bahwa salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mencapai pemerintahan yang baik adalah dengan melakukan pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah selaku pemegang kebijakan sektor publik menjalankan tugasnya dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat. pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa kebutuhan akan pengukuran kinerja pemerintah daerah ini merupakan ujung dari tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik.

Salah satu instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan. Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Hal yang menyebabkan

keterbatasan penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan pemerintah daerah, antara lain: (1) Penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintahan daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial. (2) Selama ini penyusunan APBD masih dilakukan berdasarkan pertimbangan *incremental budget*, yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah persentase tertentu (biasanya berdasarkan tingkat inflasi). Penyusunan dengan pendekatan *incremental* tersebut, sering kali mengabaikan bagaimana rasio keuangan dalam APBD. Misalkan adanya prinsip “yang penting pendapatan naik meskipun untuk menaikkan itu diperlukan biaya yang tidak efisien”. Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, APBD seharusnya disusun dengan pendekatan kinerja (*performance budget*). (3) Penelitian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBDnya.

Meskipun penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan pemerintah daerah masih sangat terbatas, namun hasil analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah daerah, selanjutnya dapat digunakan untuk tolak ukur dalam: (1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membangun penyelenggaraan otonomi daerah. (2) Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. (3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan

pendapatan daerahnya. (4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. (5) Melihat pertumbuhan atau perkiraan perolehan pendapatan dan pengelolaan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya pendapatan asli daerah terhadap jumlah total pendapatan daerah (Aula, 2013). Melalui analisis rasio kemandirian daerah ini, dapat diketahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Berikut ini disajikan rasio kemandirian keuangan daerah di DIY tahun 2006-2013.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di DIY tahun 2006-2013

Kabupaten/Kota	Rerata Kemandirian Keuangan Daerah	Kriteria
Bantul	9,81%	Rendah Sekali
Gunung Kidul	5,57%	Rendah Sekali
Kulon Progo	7,68%	Rendah Sekali
Sleman	16,62%	Rendah Sekali
Yogyakarta	22,69%	Rendah Sekali

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 1 di atas, kemandirian keuangan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2013 termasuk dalam kriteria rendah sekali karena nilai kemandirian keuangan daerahnya kurang dari 25%. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian khusus. Kriteria rendah sekali ini mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah pula. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Putri (2014) menunjukkan bahwa PDRB merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah. Saragih (2003) dalam Putri (2014) mengatakan bahwa keberhasilan otonomi daerah diukur dari seberapa besar porsi sumbangan masyarakat lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah atau PDRB. Apabila PDRB meningkat, maka hal ini mengindikasikan terdorongnya peningkatan pendapatan asli daerah.

Winarna (2010) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Tengah. Sedangkan Darmanto (2012) yang melakukan penelitian pada pemerintah daerah di Indonesia, menunjukan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Steven dan McGowen (1983) menyatakan bahwa Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Namun penelitian lainnya menunjukan hasil sebaliknya, bahwa Jumlah Penduduk (Patriati dan Winarna, 2010), PDRB (Winarna, 2010) dan Jumlah Tenaga Kerja (Darmanto, 2012) tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Jolianis (2014) menunjukan bahwa Sumber Daya Alam berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan

Daerah. Sumber Daya Alam yang dimiliki suatu daerah akan menentukan tingkat penerimaan daerah. Penerimaan daerah yang bersumber dari sumber daya alam masing-masing daerah, tentunya mengindikasikan bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah yang telah dilakukan oleh Putri (2014), Darmanto (2012), Steven dan McGowen (1983), Patriati dan Winarna (2010) serta Jolianis (2014) di atas menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan hasil penelitian. Pertama, pada penelitian Putri (2014) terbukti bahwa PDRB berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan pada penelitian Winarna (2010) variabel PDRB terbukti tidak berpengaruh. Kedua, Jumlah Penduduk pada penelitian Darmanto (2012) menunjukkan adanya pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Namun pada penelitian Patriati dan Winarna (2010) menunjukkan hasil yang sebaliknya. Ketiga, Jolianis (2014) mengungkapkan bahwa Sumber Daya Alam yang dimiliki setiap daerah turut mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah. Perbedaan lain penelitian ini terletak pada tempat penelitian, yaitu kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rentang waktu antara tahun 2006 sampai 2013.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pengujian kembali faktor-faktor yang

mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah ini dilakukan guna mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga langkah perbaikan di masa mendatang lebih terarah. Faktor-faktor yang diuji kembali dalam penelitian ini, yaitu PDRB sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) dan Winarna (2010), Jumlah Penduduk sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Darmanto (2012), variabel Jumlah Tenaga Kerja seperti penelitian yang dilakukan oleh Steven dan McGowen (1983) dan Sumber Daya Alam pada penelitian Jolianis (2014). Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2013”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut.

1. Setiap daerah memiliki potensi yang beragam dan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.
2. Kemampuan mengenali potensi daerah yang beragam ini tidak dapat ditangani sendiri oleh salah satu pihak saja (pemerintah pusat).
3. Perbedaan potensi yang dimiliki masing-masing daerah menjadikan pemerintah daerah berusaha untuk memanfaatkan keunggulan potensi yang dimiliki daerahnya.
4. Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan perlu adanya pengukuran kinerja

keuangan pemerintah daerah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan sektor publik.

5. Adanya tuntutan terhadap kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
6. Perlu adanya identifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, sehingga langkah perbaikan di masa mendatang lebih terarah.
7. Identifikasi faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah yang telah dilakukan sebelumnya masih terdapat beberapa perbedaan hasil.
8. Kemandirian keuangan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam kriteria rendah sekali.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengidentifikasi batasan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang diteliti agar penelitian lebih fokus. Penelitian ini difokuskan untuk melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melibatkan data seluruh kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2006-2013. Penelitian dilakukan terutama untuk menganalisis variabel PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja, dan Sumber Daya Alam terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut.

1. Apakah PDRB berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Apakah Sumber Daya Alam berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta?
5. Apakah PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja, dan Sumber Daya Alam berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang dicapai, yaitu sebagai berikut.

1. Mengetahui apakah PDRB berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui apakah Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mengetahui apakah Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Mengetahui apakah Sumber Daya Alam berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Mengetahui apakah PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja, dan Sumber Daya Alam berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teoritis berkaitan dengan ekonomi regional, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta mengasah daya analisis dalam memecahkan masalah ekonomi regional mengenai Kemandirian Keuangan Daerah.

b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bagian informasi sekaligus sumbangan pemikiran terhadap arah kebijakan yang akan dapat ditempuh oleh pemerintah daerah, khususnya terkait peningkatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.

- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- 2) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 3) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 4) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 5) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 6) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 7) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 3) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari

penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;

- 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan;
- 5) Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
- 6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

2. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi. Laporan keuangan pemerintah daerah, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD).

Sebagaimana diketahui bahwa pada awal tahun, Pemerintah Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun dan sumber pembiayaan kegiatan tersebut.

Untuk menilai tingkat pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran, diperlukan analisis terhadap laporan keuangan daerah. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah posisi keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan beberapa metode analisis yang lazim digunakan untuk menganalisis terhadap laporan keuangan. Suprpto (2006) menyebutkan salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Suyono (2010) mengatakan bahwa untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu organisasi atau badan, perlu dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari organisasi atau badan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya. Terdapat beberapa metode dalam analisis laporan keuangan, salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan yang

dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga darinya dapat dievaluasi kinerja keuangan organisasi atau badan yang selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan tertentu.

3. Kemandirian Keuangan Daerah

a. Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berarti pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Halim (2001) mengemukakan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik menggunakan sumber daya keuangan yang digali dari potensi daerahnya sendiri.

b. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang

berasal dari sumber lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern, terutama pemerintah pusat dan propinsi semakin rendah. Formula yang digunakan untuk menentukan tingkat kemandirian daerah, yaitu dengan menggunakan rasio kemandirian daerah, sebagai berikut (Halim, 2001).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini disajikan rasio Kemandirian Keuangan Daerah beserta interpretasinya.

Tabel 2. Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Daerah	Kriteria
00,00% - 25,00%	Rendah Sekali
25,01% - 50,00%	Rendah
50,01% - 75,00%	Sedang
75,01% - 100,00%	Tinggi

Sumber: Halim (2001)

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Selain itu, rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

c. Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan ideal apabila sumber pendapatan asli daerah menyumbang bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan dengan sumber lainnya. Namun dalam kenyataannya di banyak daerah, pendapatan asli daerah tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran, proporsinya terhadap pendapatan selain dari pendapatan asli daerah merupakan indikasi derajat Kemandirian Keuangan Daerah. Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001) pola hubungan Kemandirian Keuangan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terdiri atas empat macam, antara lain:

- 1) Pola hubungan instuktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- 2) Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- 4) Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau yang lebih dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Laju pertumbuhan PDRB disumbang oleh sembilan faktor, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Pada dasarnya, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu, atau

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor ekonomi. (BPS, 2015)

Perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Metode tak langsung biasa digunakan jika data yang diperlukan untuk menghitung PDRB tidak tersedia.

Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB secara riil (tidak ada pengaruh harga). Ada empat cara yang dikenal untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu: revaluasi, ekstrapolasi, deflasi dan deflasi berganda. Menurut BPS, kegunaan PDRB dan PDRB per kapita adalah:

- 1) PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

- 2) PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, setiap sektor atau komponen penggunaan dari tahun ke tahun.
- 3) PDRB per kapita atas dasar harga yang berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- 4) PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Tingkat PDRB yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat yang juga tinggi. Putri (2014) melakukan pengujian terkait pengaruh PDRB terhadap kemandirian daerah. Apabila PDRB meningkat, maka hal ini mengindikasikan terdorongnya peningkatan pendapatan asli daerah. Tingginya PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat tinggi.

b. Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah Penduduk dalam penelitian ini adalah keseluruhan penduduk yang berada pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Darmanto (2012) menyatakan bahwa salah satu indikator yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, yaitu pemerintah daerah yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik.

Jumlah populasi penduduk yang menempati daerah juga berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semakin besar Jumlah Penduduk suatu daerah, maka akan menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Jumlah Penduduk mempengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak Jumlah Penduduk maka semakin banyak pula tuntutan pada pemerintah daerah atas pelayanan publik yang baik.

c. Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam melaksanakan proses produksi dan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika tenaga kerja terlibat dalam proses produksi, tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari usaha yang telah dilakukannya, yakni upah. Menurut Badan Pusat Statistik, bekerja adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, seperti:

- 1) Pekerjaan tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, perusahaan menghentikan kegiatannya sementara (misalnya kerusakan mesin) dan sebagainya.
- 2) Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya.

3) Orang-orang yang bekerja dibidang keahlian seperti dokter atau tukang.

Modal pembangunan yang penting selain keuangan daerah dan investasi adalah sumber daya manusia. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan mempercepat pembangunan daerah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap daerah. Hasil yang dicapai dalam pembangunan juga akan lebih cepat dirasakan untuk daerah sendiri sehingga nantinya dapat merangsang kesadaran masyarakat membangun wilayah lokal masing-masing. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas di samping terpenuhinya kuantitas permintaan tenaga kerja

Menurut Winarna (2010) Jumlah Tenaga Kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas dan pelaksana di suatu daerah, sehingga sumber daya ini dapat menentukan maju atau mundurnya daerah yang bersangkutan. Penelitian yang dilakukan oleh Steven dan McGowen (1983) meyakini bahwa Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Semakin besar tingkat Jumlah Tenaga Kerja yang dimiliki oleh suatu daerah, maka akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pendapatan pemerintah daerah yang tinggi inilah yang akan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

d. Sumber Daya Alam

Pemanfaatan Sumber Daya Alam berpotensi memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara dan daerah. Pemanfaatan Sumber Daya Alam daerah yang dapat dinilai secara ekonomi dapat dilihat dari besaran pendapatan sektor alam terhadap PDRB, antara lain sektor pertanian dan sektor penggalian dan pertambangan.

1) Sektor pertanian

Sektor pertanian mencakup pengusahaan dan pemanfaatan benda-benda biologis (hidup) yang diperoleh dari alam dengan tujuan untuk konsumsi sendiri atau dijual. Sektor pertanian mencakup subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan. Subsektor tanaman bahan makanan meliputi seluruh kegiatan yang menghasilkan komoditas bahan makanan. Subsektor tanaman perkebunan meliputi semua kegiatan yang menghasilkan komoditas tanaman perkebunan baik yang diusahakan oleh rakyat maupun perusahaan perkebunan. Subsektor peternakan dan hasil-hasilnya meliputi semua kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong dan diambil hasil-hasilnya, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh usaha peternakan. Subsektor kehutanan mencakup kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran, termasuk disini kegiatan perburuan. Subsektor perikanan

mencakup kegiatan penangkapan, pembenihan, budidaya segala jenis ikan dan biota ikan lainnya, baik yang berada di air tawar maupun air asin.

2) Sektor pertambangan dan penggalian

Kegiatan pertambangan dan penggalian adalah kegiatan yang mencakup penggalian, pengeboran, penyaringan, pencucian, pemilihan dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, cair maupun gas. Sifat dan tujuan kegiatan tersebut yaitu menciptakan nilai guna dari barang tambang dan galian sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan, dijual, atau diproses lebih lanjut. Seluruh jenis komoditas dalam sektor pertambangan dan penggalian dapat dikelompokkan ke dalam tiga subsektor, yaitu pertambangan migas, pertambangan non migas dan penggalian.

Output dari kegiatan penggalian diperoleh berdasarkan hasil perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit barang tersebut. Biaya antara diperoleh dengan mengalikan rasio biaya antara dan output. Perhitungan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan menggunakan metode revaluasi.

B. Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dalam penelitian ini digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berpikir mengenai penelitian ini. Selain itu, juga untuk mengetahui persamaan dan

perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya, sekaligus sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Beberapa penelitian yang dikaji, yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Habib Candra Darmanto (2012) dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh *Population*, *Employment*, *Size*, dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk (*population*), Jumlah Tenaga Kerja (*employment*), ukuran (*size*) pemerintah daerah, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Sampel penelitian yang dipilih berdasarkan *purposive sampling method* berjumlah 704 laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia tahun 2008-2010. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis data regresi berganda (*multiple regression*) menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk (*population*) dan *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Sedangkan variabel Jumlah Tenaga Kerja (*employment*) dan ukuran (*size*) pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
2. Steven dan McGowen (1983) telah melakukan penelitian terkait indikator keuangan dan tren keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan tiga buah variabel yang terdiri dari variabel pendapatan dan pengeluaran, variabel pajak dan *real estate*, dan variabel *composite* yang terbagi menjadi *debt to revenue*, *grant to revenue ratio*, serta *grant to expenditure ratio*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tren keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti Jumlah Penduduk dan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ratri Patriati (2010) dalam skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah”. Penelitian ini menguji pengaruh *revenue*, *expenditure*, *real estate*, *capital*, *taxes*, *grant*, *population*, dan *tourist* sebagai variabel independen, terhadap kinerja keuangan sebagai variabel dependen yang diproksikan dengan *faktor score* dari rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan sampel penelitian yang dipilih berdasarkan *purposive sampling method*. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis data regresi berganda (*multiple regression*) pada sampel yang berjumlah 70 pemerintah daerah menunjukkan bahwa *revenue* dan *expenditure* merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan variabel *real estate*, *capital*, *taxes*, *grant*, *population* dan *tourist* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Jaka Winarna (2010) dalam *Journal of Rural and Development* yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah”. Penelitian pada pemerintah di Jawa Tengah ini menguji pengaruh variabel *revenue*, *expenditure*, *real estate*,

taxes, grant, population tourist, gross domestic product, dan *employment* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan tiga rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Sampel penelitian yang dipilih berdasarkan *purposive sampling method* berjumlah 70 laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah tahun 2005-2007. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis data regresi berganda (*multiple regression*) menunjukkan bahwa variabel *revenue* dan *expenditure* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

C. Kerangka Berpikir

Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Hasil penelitian yang baik terwujud dari kerangka yang sistematis dan saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakilkan oleh rasio kemandirian dengan menggunakan empat variabel bebas, yaitu PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja, dan Sumber Daya Alam.

1. Pengaruh PDRB terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau yang lebih dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Tingkat PDRB yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat yang juga tinggi.

Putri (2014) melakukan pengujian terkait pengaruh PDRB terhadap kemandirian daerah. Apabila PDRB meningkat, maka hal ini mengindikasikan terdorongnya peningkatan pendapatan asli daerah. Tingginya PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat tinggi.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Jumlah Penduduk dalam penelitian ini adalah keseluruhan penduduk yang berada pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Darmanto (2012) menyatakan bahwa salah satu indikator yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, yaitu pemerintah daerah yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Jumlah populasi penduduk yang menempati daerah juga berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semakin besar Jumlah Penduduk suatu daerah, maka akan menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Jumlah Penduduk mempengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak Jumlah Penduduk maka semakin banyak pula tuntutan pada pemerintah daerah atas pelayanan publik yang baik.

3. Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

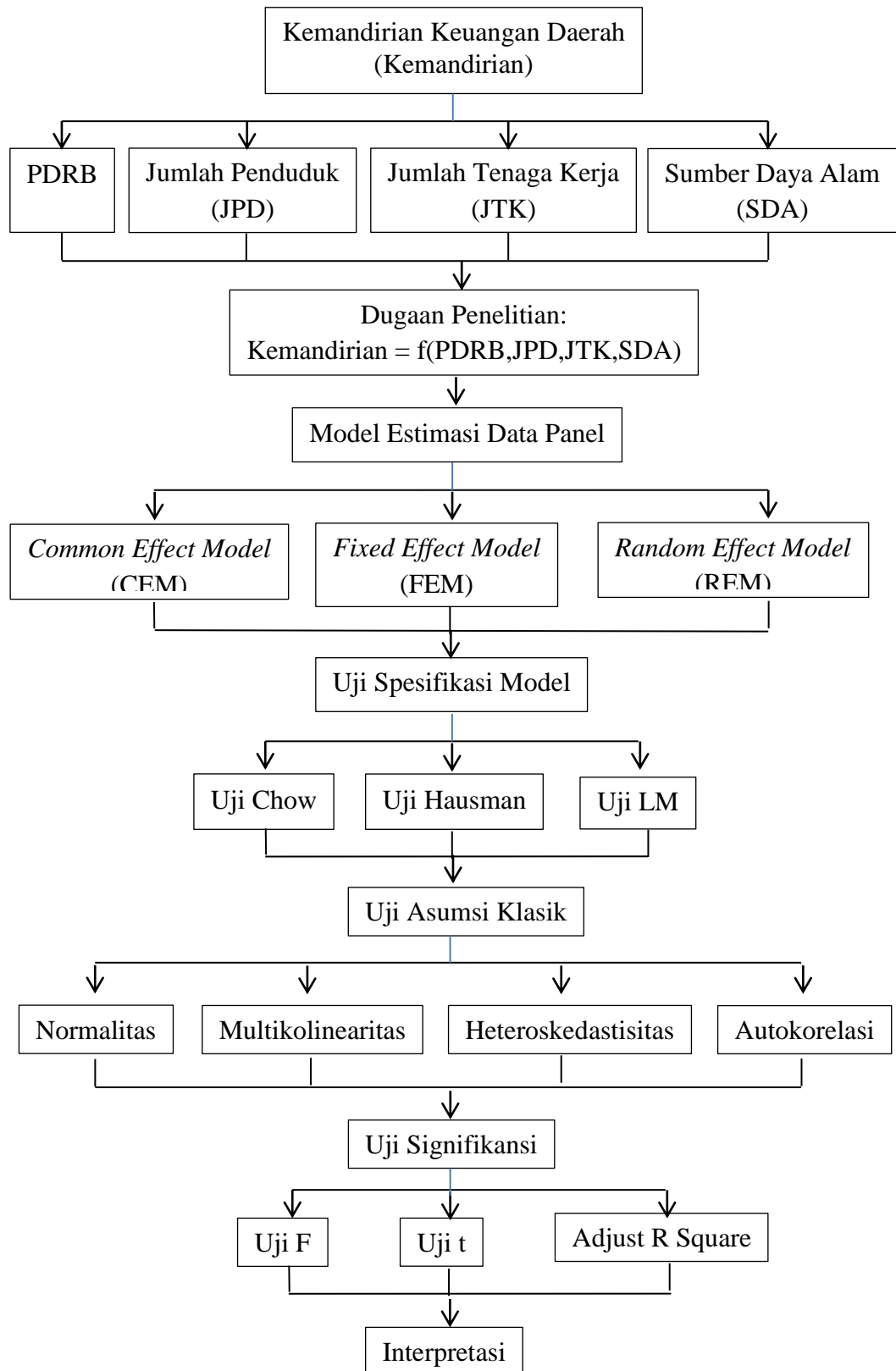
Penelitian yang dilakukan oleh Steven dan McGowen (1983) menyatakan bahwa Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Semakin besar tingkat Jumlah Tenaga Kerja yang dimiliki oleh suatu daerah, maka akan dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat dan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pendapatan pemerintah daerah yang tinggi inilah yang akan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

4. Pengaruh Sumber Daya Alam terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Jolianis (2014) menunjukkan bahwa Sumber Daya Alam berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah. Sumber Daya Alam yang dimiliki suatu daerah akan menentukan tingkat penerimaan daerah. Penerimaan daerah yang bersumber dari Sumber Daya Alam masing-masing daerah, tentunya mengindikasikan bahwa Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh suatu daerah mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.

Kerangka pemikiran model penelitian dan hubungan antar variabel dalam penelitian ini digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

D. Hipotesis Penelitian

Arikunto (2010) mengemukakan bahwa hipotesis adalah alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam penelitiannya. Adapun hipotesis penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Sumber Daya Alam berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Tenaga Kerja dan Sumber Daya Alam secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang mencari pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel.

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Penelitian ini menggunakan lima variabel penelitian yang terdiri dari satu variabel dependen dan empat variabel independen, yaitu sebagai berikut.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat karena adanya variabel independen. Pada penelitian ini menempatkan Kemandirian Keuangan Daerah yang digambarkan dengan rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Formula yang digunakan, sebagai berikut (Halim, 2001).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Penelitian ini menetapkan empat variabel independen (bebas), yaitu sebagai berikut.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit-unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk dalam penelitian ini adalah keseluruhan penduduk yang berada pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini mengacu pada Jumlah Penduduk hasil proyeksi berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, sensus penduduk tahun 2010 dan hasil proyeksi berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 menurut kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja dalam penelitian ini merupakan jumlah orang yang bekerja tanpa memperhitungkan berapa banyak pekerjaan yang dimiliki tiap orang, pendapatan dan jumlah jam kerja mereka.

d. Sumber Daya Alam

Pemanfaatan Sumber Daya Alam daerah yang dapat dinilai secara ekonomi dapat dilihat dari besaran pendapatan sektor alam terhadap PDRB, antara lain sektor pertanian dan sektor penggalian dan pertambangan.

C. Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua atau data yang diperoleh dari hasil publikasi pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu penggabungan dari data silang tempat (*cross section*) dan data deret waktu (*time series*) dari tahun 2006-2013.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Laporan Realisasi Anggaran masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2006-2013
2. PDRB atas dasar harga konstan 2000 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2006-2013
3. Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000 di masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2006-2009

4. Jumlah Penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 di masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 di masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2011-2013
6. Jumlah Tenaga Kerja di masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2006-2013

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Arikunto (2010) teknik dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, lengger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah, PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja, dan Sumber Daya Alam.

E. Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel (*pooled data*) merupakan data yang mengkombinasikan antara data deret waktu (*time series*) dan data kerat lintang (*cross section*). Data deret waktu (*time series*) adalah data observasi pada satu subjek penelitian diamati dalam satu periode waktu, misalnya selama sembilan tahun. Sedangkan data kerat lintang (*cross section*) adalah data observasi pada beberapa subjek penelitian dalam satu waktu, misalnya dalam satu tahun. Dalam data panel,

observasi dilakukan pada beberapa subjek dianalisis dari waktu ke waktu. Persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; i = 1, 2, 3, \dots, N$$

di mana N adalah banyaknya data *cross section*. Sedangkan persamaan model dengan *time series* dapat ditulis sebagai berikut.

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t ; t = 1, 2, 3, \dots, T$$

di mana T adalah banyaknya data *time series*. Sehingga persamaan data panel merupakan pengkombinasian dari persamaan *cross section* dan *time series* dapat ditulis sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it} ; i = 1, 2, 3, \dots, N ; t = 1, 2, 3, \dots, T$$

di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, N adalah banyaknya observasi, T adalah banyaknya waktu, dan N x T adalah banyaknya data panel.

Oleh karena itu, variabel-variabel dalam penelitian ini diaplikasikan dalam sebuah model, sebagai berikut.

$$\text{KEMANDIRIAN}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB}_{it} + \beta_2 \text{JPD}_{it} + \beta_3 \text{JTK}_{it} + \beta_4 \text{SDA}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

KEMANDIRIAN = Kemandirian Keuangan Daerah

PDRB = PDRB

JPD = Jumlah Penduduk

JTK = Jumlah Tenaga Kerja

SDA = Sumber Daya Alam

ε = *Error Term*

i menunjukkan subjek ke-i, sedangkan t menunjukkan tahun ke-t

Beberapa kelebihan data panel menurut Gujarati (2013), antara lain:

- a. Teknik estimasi data panel dapat mengatasi heterogenitas dalam setiap unit secara eksplisit dengan memberikan variabel spesifik subjek.
- b. Penggabungan observasi *time series* dan *cross section* memberikan lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinearitas antarvariabel, lebih banyak *degree of freedom* dan lebih efisien.
- c. Dengan mempelajari observasi *cross section* berulang-ulang, data panel sangat cocok untuk mempelajari dinamika perubahan.
- d. Data panel paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak bisa dilihat pada data *time series* murni atau *cross section* murni.

Model yang dapat digunakan dalam regresi data panel ada empat model, antara lain: model OLS *pooled*, model *fixed effects least square dummy variabel* (LSDV), model *fixed effects within-group* dan model *random effect* (Gujarati, 2013). Pemilihan model yang akan dipakai dalam penelitian diseleksi dengan uji spesifikasi model yang terdiri atas dua uji spesifikasi, yaitu efek tetap (*fixed effects*) atau efek random (*random effect*).

2. Uji Spesifikasi Model

a. Uji Spesifikasi Model dengan Uji Chow

Uji spesifikasi bertujuan untuk menentukan model analisis data panel yang akan digunakan.

Uji Chow digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau model *common effect* yang sebaiknya dipakai.

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas Chi-square lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *common effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-square kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *fixed effect*. Ketika model yang terpilih adalah *fixed effect* maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu uji Hausmann untuk mengetahui apakah sebaiknya memakai *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM).

b. Uji Spesifikasi Model dengan Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, yaitu *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM). Pada *fixed effect model* (FEM), setiap obyek memiliki intersep yang berbeda-beda, akan tetapi intersep masing-masing obyek tidak berubah seiring waktu. Hal ini disebut dengan *time-invariant*. Sedangkan pada *random effect model* (REM), intersep (bersama) mewakili nilai rata-rata dari semua intersep (*cross section*) dan komponen mewakili deviasi (acak) dari intersep individual terhadap nilai rata-rata tersebut (Gujarati, 2013). Hipotesis dalam uji Hausmann sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Jika H_0 ditolak maka kesimpulannya sebaiknya memakai *fixed effect model* (FEM). Karena *random effect model* (REM) kemungkinan berkorelasi dengan satu atau lebih variabel bebas. Sebaliknya, apabila H_a ditolak, maka model yang sebaiknya dipakai adalah *random effect model* (REM).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, nilai residualnya berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dengan *Jarque-Bera Test* di mana variabel tersebut dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikoliniearitas bertujuan menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Apabila variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak ortugal. Variabel tidak ortugal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Menurut Gujarati (2013), jika koefisien korelasi antarvariabel bebas lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas dari multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual antar pengamatan tetap, maka kondisi ini disebut homoskedastis. Akan tetapi jika berbeda, maka disebut heteroskedastis. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat homoskedastis. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastis adalah dengan *me-regress* model dengan log residu kuadrat sebagai variabel terikat.

H_0 : Homoskedastis

H_a : Heteroskedastis

Apabila probabilitas dari masing-masing variabel bebas $> 0,05$ maka terjadi penerimaan terhadap H_0 . Sehingga tidak terdapat heteroskedastis pada model tersebut atau hasilnya data dalam kondisi homoskedastis.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (untuk data *times serie*) atau ruang (data *cross-section*). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang sebelumnya. Untuk mendeteksi

adanya masalah ini, dapat digunakan uji *Durbin-Watson (DW)*. Kriteria dari uji DW sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Pengujian Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl < d < du$
Ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-du < d < 4dl$
Tidak ada autokorelasi	Jangan tolak	$du < d < 4-du$

Sumber: Damodar Gujarati, *Basic Econometrics*

4. Uji Signifikansi

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) atau *goodness of fit* merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen. Nilai Koefisien Determinasi (R^2) mengandung kelemahan mendasar di mana adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R^2*). Nilai *adjusted R^2* berkisar antara nol sampai satu. Apabila nilai *adjusted R^2* makin mendekati satu, maka makin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

b. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji masing-masing variabel independen apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan *level of significant* (α) 0,05. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak yang berarti

variabel independen yang diuji berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan menggunakan alat analisis yaitu ANOVA dengan kriteria pengujian menggunakan *level of significant* (α) 0,05. Apabila $F_{hitung} > 0,05$ berarti terdapat pengaruh secara simultan dan apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah layak untuk digunakan sebagai model regresi dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi :

- Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara
- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut.



Gambar 2. Peta Daerah Istimewa Yogyakarta

Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara 7°.33' - 8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00' - 110°.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²), merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari :

- Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km² (18,40 persen)
- Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91 persen)
- Kabupaten Gunung Kidul dengan luas 1.485,36 km² (46,63 persen)
- Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04 persen)
- Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02 persen)

Tabel 4. Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Luas Daerah di DIY

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Area (km ²)
		Kota	Desa	Jumlah	
Bantul	17	47	28	75	506,85
Gunung Kidul	18	5	139	144	1.485,36
Kulon Progo	12	13	75	88	586,27
Sleman	17	59	27	86	574,82
Yogyakarta	14	45	0	45	32,50
DIY	78	169	269	438	3.185,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil Susenas Agustus 2014 Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 tercatat 3.666.533 jiwa, dengan persentase Jumlah Penduduk laki-laki 49,47 persen dan penduduk perempuan 50,53 persen. Menurut hasil proyeksi penduduk SP2010 *back casting*, persentase penduduk kota mencapai 66,74 persen dan penduduk desa mencapai 33,26 persen. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 terhadap tahun 2010 mencapai 0,98 persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, yakni 0,82 persen.

Pasar tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh empat lapangan usaha, yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pertanian; sektor jasa-jasa; dan sektor industri pengolahan. Sektor pertanian yang pada awalnya paling dominan dalam menyerap angkatan kerja secara berangsur-angsur perannya mulai tergantikan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mampu menyerap angkatan kerja sebesar 26,64% di bulan Februari 2014. Meskipun peranannya semakin menurun, sektor pertanian masih menjadi andalan utama untuk menyerap angkatan kerja terutama di daerah perdesaan dan di bulan Februari 2014 mampu menyerap angkatan kerja sebesar 25,42%. Sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan masing-masing menyerap angkatan 20,75% dan 14,91%. Kedua sektor ini mengalami peningkatan peranan yang cukup signifikan dalam menyerap angkatan kerja. Keempat sektor yang lainnya (pertambangan, listrik, gas dan air bersih; konstruksi; angkutan dan komunikasi; dan keuangan) memiliki peranan yang relatif rendah, tetapi perkembangan andilnya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. (Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta)

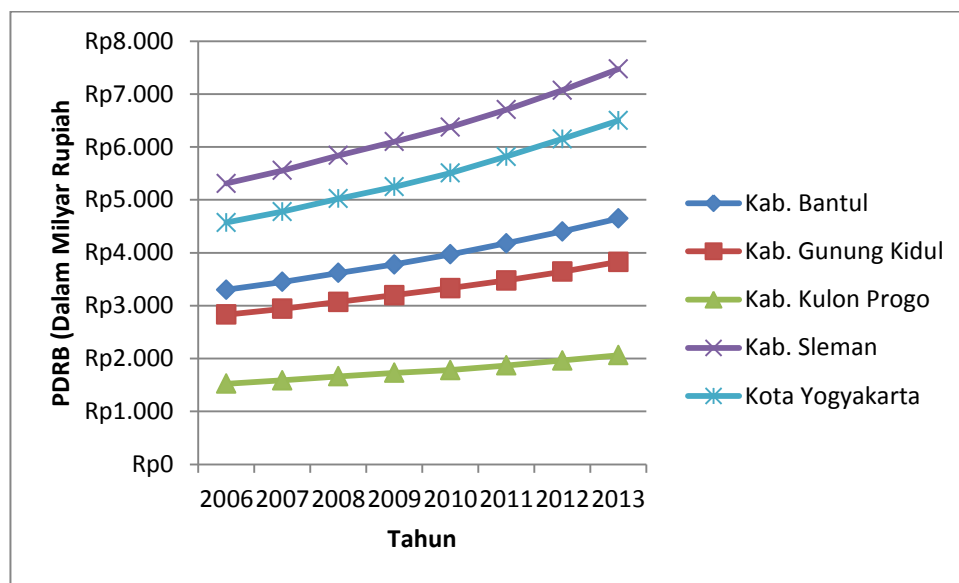
Adapun kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja, dan Sumber Daya Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga

berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor ekonomi.

Berdasarkan perhitungan PDRB atas harga konstan, perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 tumbuh sebesar 5,18 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,40 persen. Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 tumbuh mengesankan karena hampir semua sektor tumbuh positif. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan paling tinggi, yaitu sebesar 8,97 persen, disusul sektor Jasa Pendidikan, Real Estate, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Perusahaan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Jasa lainnya, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas serta Sektor Pertambangan dan Penggalian, yaitu 7,91 persen sampai dengan 2,11 persen. Sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh negatif 2,13 persen. Berikut ini grafik PDRB menurut kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 2006-2013.



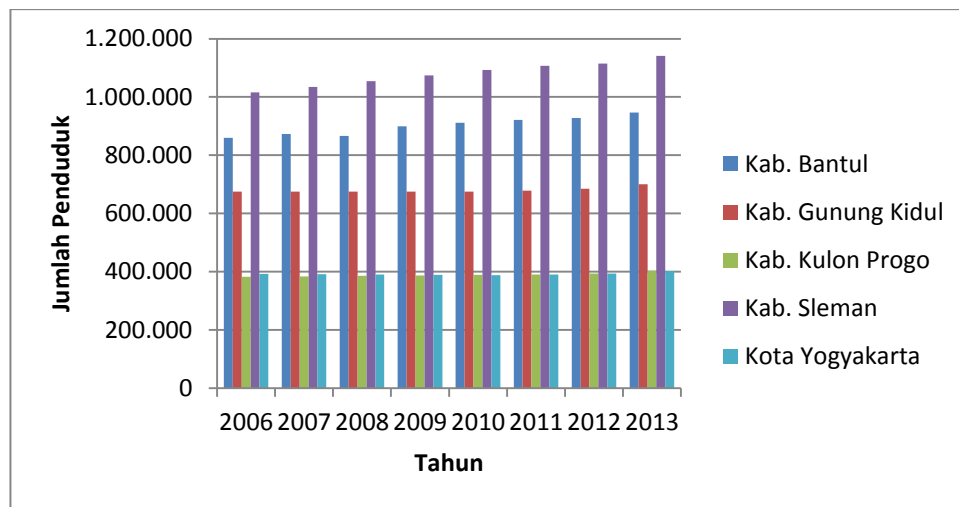
Gambar 3. PDRB Menurut Kabupaten/Kota di DIY 2006-2013

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa perolehan PDRB semua kabupaten/kota di DIY memiliki tren atau kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan kesejahteraan penduduk DIY. Selain itu, peningkatan PDRB juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian pada masing-masing kabupaten/kota di DIY.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk DIY tahun 2014 tercatat 3.666.533 jiwa, dengan persentase Jumlah Penduduk laki-laki 49,47 persen dan penduduk perempuan 50,53 persen. Menurut hasil proyeksi penduduk SP2010 *back casting*, persentase penduduk kota mencapai 66,74 persen dan penduduk desa mencapai 33,26 persen. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 terhadap tahun 2010 mencapai 0,98 persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, yakni 0,82 persen.

Berikut grafik perubahan Jumlah Penduduk pada tahun 2006-2013



Gambar 4. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY 2006-2013

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 3.185,80 km², maka kepadatan penduduk di DIY tercatat 1.142 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni 12.322 jiwa per km² dengan luas wilayah hanya sekitar satu persen dari luas wilayah DIY. Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki wilayah terluas mencapai 46,63 persen memiliki kepadatan penduduk terendah yang dihuni rata-rata 470 jiwa per km².

Apabila dicermati lebih dalam, selama 2006-2013 laju pertumbuhan penduduk di DIY tercepat terjadi di Kabupaten Sleman dan Bantul. Sebaliknya, Kota Yogyakarta justru mengalami pertumbuhan penduduk yang negatif. Sebagai wilayah pusat pemerintahan dan perekonomian, Kota Yogyakarta semakin jenuh untuk menampung penduduk akibat meningkatnya aktifitas perekonomian, pemerintahan dan sosial. Akibatnya, terjadi perkembangan kawasan pemukiman dan peningkatan Jumlah

Penduduk di wilayah penyangganya, terutama di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

3. Jumlah Tenaga Kerja

Berdasarkan data statistik ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumlah Penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2015 diperkirakan mencapai 2,87 juta jiwa. Jumlah Penduduk usia kerja laki-laki tercatat 1,4 juta dan perempuan 1,47 juta jiwa. Secara total terjadi kenaikan sebanyak 400 ribu orang bila dibandingkan keadaan pada Februari 2014 yaitu dari 2,83 juta orang. Berikut ini disajikan tabel penduduk usia kerja menurut jenis kegiatan selama seminggu Februari 2015.

Tabel 5. Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu

Kegiatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kota+Desa (N)	1.403.719	1.466.296	2.870.015
Kota+Desa (%)	100,00	100,00	100,00
Angkatan Kerja:	83,95	62,72	73,10
Bekerja	79,58	61,09	70,13
Pengangguran	4,39	1,63	2,98
Bukan Angkatan Kerja:	16,05	37,28	26,90
Sekolah	8,26	9,10	8,69
Mengurus Rumah Tangga	2,87	26,05	14,71
Lainnya	4,92	2,13	3,49

Sumber: Sakernas Februari 2015

Berdasarkan tabel 5 (hasil Sakernas Februari 2015) di atas, persentase penduduk DIY umur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu adalah 73,10 persen merupakan angkatan kerja yaitu 70,13 persen bekerja dan 2,98 persen pengangguran. Sedangkan persentase bukan angkatan kerja sebesar 26,90 yaitu berstatus sekolah 8,69 persen, mengurus

rumah tangga 14,71 persen dan lainnya 3,49 persen. Persentase angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2015 mencapai sekitar 73,10 persen dari penduduk usia kerja, yang terdiri atas 43,83 persen angkatan kerja perempuan dan 56,17 persen angkatan kerja laki-laki.

4. Sumber Daya Alam

Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilihat melalui pemberdayaan sektor pertanian dan sektor penggalian. Sektor penggalian masuk dalam kategori pemanfaatan Sumber Daya Alam karena hasil galian tersebut merupakan hasil alam yang terkandung dalam bumi serta diambil manfaatnya. Pada tahun 2013 pemanfaatan kedua sektor tersebut menyumbang 15,87% dari total pendapatan daerah.

Pada tahun 2008, pemerintah menggerakkan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). Hal ini mendorong pertumbuhan sektor pertanian hingga mencapai 5,63% pada tahun tersebut. Akan tetapi berakhirnya program P2BN, kondisi iklim yang kurang mendukung serta adanya erupsi Merapi menyebabkan pertumbuhan sektor pertanian berkontraksi di tahun 2010-2011. Tahun berikutnya kondisi iklim kembali membaik sehingga pertumbuhan sektor pertanian kembali positif dan mencapai angka 4,19% pada tahun 2012.

Berdasarkan klasifikasi penggunaan lahan, BPS membagi menjadi dua kategori besar, yaitu lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu sawah dan bukan sawah.

Lahan sawah terdiri atas sawah irigasi, sawah tadah hujan dan lainnya. Sedangkan lahan bukan sawah terdiri dari tegal/kebun, ladang, hutan rakyat, padang penggembalaan, lahan sementara tidak diusahakan dan lainnya. Kemudian untuk lahan bukan pertanian, antara lain jalan, pemukiman, perkantoran, dan lain-lain. Berikut disajikan pengklasifikasian penggunaan lahan menurut kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014.

Tabel 6. Klasifikasi Penggunaan Lahan Menurut Kabupaten/Kota di DIY

Kabupaten/Kota	Luas Lahan Pertanian		Luas Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah		
Bantul	15.191	13.639	21.855	50.685
Persentase (%)	29,97	26,91	43,12	100,00
Gunung Kidul	7.865	117.701	22.970	148.536
Persentase (%)	5,30	79,24	15,46	100,00
Kulon Progo	10.296	35.027	13.304	58.627
Persentase (%)	17,56	59,75	22,69	100,00
Sleman	22.233	20.905	14.344	57.482
Persentase (%)	38,68	36,37	24,95	100,00
Yogyakarta	65	17	3.168	3.250
Persentase (%)	2,00	0,52	97,48	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015

Berdasarkan data di atas, maka persentase luas lahan pertanian pada empat kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih besar dibandingkan dengan luas lahan bukan pertanian. Sedangkan pada daerah kota, luas lahan bukan pertanian yang memiliki persentase lebih besar.

B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (BPS DIY) dan publikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui www.bpk.go.id

husus tahun 2006-2013. Penelitian ini menguji pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja dan Sumber Daya Alam terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel.

Berikut ini merupakan tabel mengenai deskripsi data dari tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 7. Statistik Deskriptif

	N	Mean	Median	Std. Dev.	Min	Max
Kemandirian	40	12,4	9,8	6,9	4,7	29,2
PDRB	40	4145,4	3896,0	1693,5	1524	7471
Σ Penduduk	40	692067,1	680622,0	277411,4	373934	1141547
Σ Tenaga Kerja	40	364863,4	410247,5	135397,0	177200	568419
SDA	40	754052,3	949351,0	460028,3	17624	1419351

Sumber: *Hasil Pengolahan Data*

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas, selama tahun 2006-2013 rasio kemandirian terendah 4,78 yang dicapai oleh Kabupaten Gunung Kidul dan tertinggi 29,25 yang dicapai Kota Yogyakarta. PDRB tertinggi diraih oleh Kota Yogyakarta sebesar Rp7.471 Milyar, sedangkan PDRB terendah diraih oleh Bantul yang hanya mencapai Rp1.524 Milyar. Jumlah Penduduk terbanyak berada di Kabupaten Sleman pada tahun 2013 sejumlah 1.141.547 jiwa, sedangkan Jumlah Penduduk terendah dimiliki oleh Kulon Progo yaitu sejumlah 373.934 jiwa. Jumlah Penduduk yang bekerja terbanyak berada di Kabupaten Sleman sebanyak 568.419 pekerja, sedangkan paling sedikit berada di Kota Yogyakarta pada tahun 2010 yaitu 177.200 pekerja. Hasil kekayaan Sumber Daya Alam terbesar dicapai oleh Kabupaten Gunung Kidul yaitu

mencapai Rp1.419.726.000.000,00, sedangkan pencapaian hasil Sumber Daya Alam paling kecil oleh Kota Yogyakarta yaitu sebesar Rp17.624.000.000,00.

C. Analisis Data

1. Penentuan Teknik Analisis Model Data Panel

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau model *common effect* yang sebaiknya dipakai. Hipotesis uji Chow yaitu sebagai berikut.

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Apabila hasil probabilitas Chi-square $> 0,05$ maka H_0 gagal ditolak, sehingga model yang dipilih adalah *common effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-square $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan model yang sebaiknya dipakai adalah *fixed effect*. Hasil estimasi uji Chow adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	Prob.
Cross-section F	7,446444	0,0003
Cross-section Chi-Square	26,934744	0,0000

Sumber: *Hasil Pengolahan Data*

Berdasarkan hasil di atas, diketahui probabilitas Chi-square = 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan model yang sebaiknya digunakan adalah model *fixed effect*. Ketika model yang terpilih adalah *fixed effect*, maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu uji Hausmann untuk

mengetahui apakah sebaiknya memakai model *fixed effect* atau model *random effect*.

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, yaitu model *fixed effect* atau model *random effect*.

H_0 : *Random Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Apabila hasil probabilitas Chi-square $> 0,05$ maka H_0 gagal ditolak, sehingga model yang dipilih adalah *random effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-square $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan model yang sebaiknya dipakai adalah *fixed effect*. Hasil estimasi uji Hausman adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Prob.
Cross-section random	29,785776	0,0000

Sumber: *Hasil Pengolahan Data*

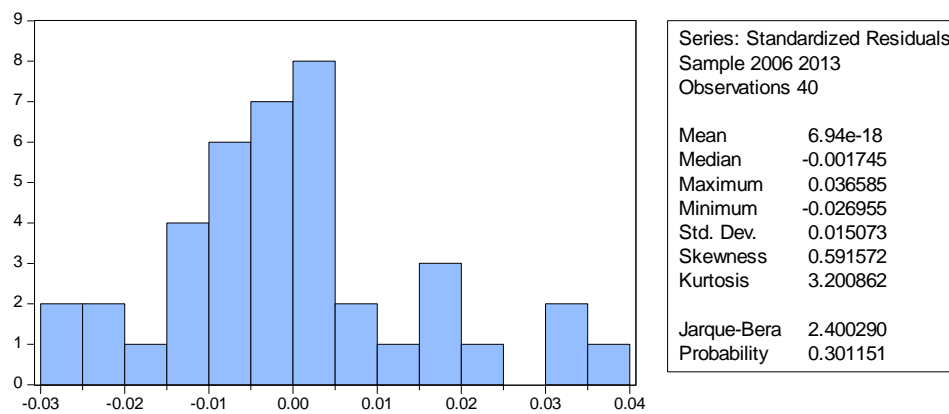
Berdasarkan hasil di atas, diketahui probabilitas Chi-square = 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan model yang sebaiknya digunakan adalah model *fixed effect*.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen kedua-duanya berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dengan *Jarque-*

Bera Test apabila probabilitas lebih dari 0,05 maka variabel tersebut berdistribusi normal.



Gambar 5. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas di atas, probabilitas sebesar 0,301151 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen atau tidak. Menurut Gujarati (2013), apabila koefisien korelasi antar variabel independen lebih besar dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, apabila koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

*	PDRB	JPD	JTK	SDA	Keterangan
PDRB	1	0,307836	0,055597	0,192005	Tidak Terjadi Multikolinearitas
JPD	0,307836	1	0,038773	-0,194287	Tidak Terjadi Multikolinearitas
JTK	0,055597	0,038773	1	0,177737	Tidak Terjadi Multikolinearitas
SDA	0,192005	-0,194287	0,177737	1	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: *Hasil Pengolahan Data*

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, semua koefisien korelasi kurang dari 0,8. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model bebas dari multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastis adalah dengan *me-regress* model dengan log residu kuadrat sebagai variabel dependen.

H_0 : Homoskedastis

H_a : Heteroskedastis

Apabila probabilitas dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05 maka terjadi penerimaan terhadap H_0 , sehingga tidak terdapat heteroskedastis pada model tersebut atau hasilnya data dalam kondisi homosedastis.

Hasil Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Prob.	Keterangan
PDRB	0,2404	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
JPD	0,1075	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
JTK	0,5857	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
SDA	0,7965	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil regresi dari log residu kuadrat terhadap seluruh variabel menunjukkan probabilitas lebih dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastis dalam model tersebut.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya masalah ini, dapat digunakan uji *Durbin-Watson (DW)*.

Berdasarkan hasil uji yang dilaksanakan, didapatkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,105644 dengan $dL = 1,285$ dan $dU = 1,721$. Nilai d hitung berada pada kriteria $0 < d < dL$ maka dapat disimpulkan bahwa ada autokorelasi positif. Oleh karena itu, dilakukan penyembuhan autokorelasi dengan *Cochrane Orcutt*, diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,960787 dan nilai d hitung berada pada kriteria $dU < d < 4-dU$ maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

3. Analisis Data Panel

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan, model yang sebaiknya digunakan adalah dengan model *fixed effect*. Kemudian model telah lolos dari uji asumsi klasik, sehingga hasil estimasi konsisten dan tidak bias. Hasil estimasi model regresi data panel sebagai berikut.

Tabel 12. Hasil Estimasi Model

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-6,522940	-2,382530	0,0235*
PDRB	0,208370	4,323822	0,0001*
JPD	0,398540	1,755586	0,0890**
JTK	-0,046319	-0,975828	0,3367
SDA	0,915555	2,112521	0,0428*

*Signifikan pada taraf 5%; **Signifikan pada taraf 10%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil di atas, diketahui probabilitas untuk variabel PDRB dan SDA masing-masing 0,0001 dan 0,0428 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa variabel PDRB dan SDA signifikan dalam taraf 5%. Selanjutnya untuk variabel JPD memiliki probabilitas sebesar 0,890 lebih kecil dari 0,10 yang berarti bahwa variabel JPD signifikan dalam taraf 10%. Sedangkan untuk variabel JTK memiliki probabilitas sebesar 0,3367 lebih besar dari 0,10 yang berarti bahwa variabel JTK tidak signifikan.

D. Hasil Uji Signifikansi

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) atau *goodness of fit* merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen. Nilai Koefisien Determinasi (R^2) mengandung kelemahan mendasar di mana adanya bias terhadap jumlah variabel

independen yang dimasukkan dalam model. Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R²*).

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0,952867
Adjusted R-squared	0,940703

Sumber: *Hasil Pengolahan Data*

Berdasarkan hasil di atas, *adjusted R²* sebesar 0,940703. Hal ini berarti bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 94,07%. Sisanya sebesar 5,93% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

2. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Hasil analisis uji t menunjukkan masing-masing variabel independen secara individu signifikan mempengaruhi variabel dependen.

a. Pengaruh PDRB Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki nilai t-hitung sebesar 4,323822 dan probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB secara individu berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Nilai koefisien regresi sebesar 0,208370 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah di DIY. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan PDRB 1% maka akan menyebabkan peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,208370%.

b. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk memiliki nilai t-hitung sebesar 1,755586 dan probabilitas sebesar 0,0890 lebih kecil dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk secara individu signifikan dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah pada taraf 10%. Nilai koefisien regresi sebesar 0,398540 menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah di DIY. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan Jumlah Penduduk 1% maka akan menyebabkan peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,398540%

c. Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Jumlah Tenaga Kerja memiliki nilai t-hitung sebesar -0,975828 dan probabilitas sebesar 0,3367 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Tenaga Kerja secara individu tidak signifikan dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.

d. Pengaruh Sumber Daya Alam Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Sumber Daya Alam memiliki nilai t-hitung sebesar 2,112521 dan probabilitas sebesar 0,0428 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sumber Daya Alam secara individu berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Nilai koefisien regresi sebesar 0,915555 menunjukkan bahwa Sumber Daya Alam berpengaruh positif terhadap

kemandirian keuangan daerah di DIY. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan pendapatan daerah dari hasil pertanian dan penggalian (Sumber Daya Alam) sebesar 1% maka akan menyebabkan peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,915555%.

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *software Eviews 8*, diperoleh nilai F hitung sebesar 78,33860 dengan probabilitas sebesar $0,000000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabel PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja dan Sumber Daya Alam secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis data panel pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja, dan Sumber Daya Alam terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2013. Berdasarkan hasil pengolahan data panel dengan model *fixed effect* diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$\text{KEMANDIRIAN}_{it} = -6,522940 + 0,208370 \text{ PDRB}_{it} + 0,398540 \text{ JPD}_{it} - 0,046319 \text{ JTK}_{it} + 0,915555 \text{ SDA}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

KEMANDIRIAN	= Kemandirian Keuangan Daerah
PDRB	= PDRB
JPD	= Jumlah Penduduk
JTK	= Jumlah Tenaga Kerja
SDA	= Sumber Daya Alam
ε	= <i>Error Term</i>

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat diketahui bahwa koefisien konstanta sebesar -6,522940. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel sistematis lain yang juga mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di DIY yang tidak masuk ke dalam model. Adapun variabel-variabel bebas dalam model yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah dijelaskan sebagai berikut.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel PDRB secara individu berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di DIY. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014). Bahwa semakin tinggi tingkat PDRB mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah tinggi dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini memicu kenaikan pada pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah.

Oleh karena pendapatan pemerintah daerah yang meningkat, maka pemerintah daerah akan mempunyai jumlah kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dengan demikian tingkat Kemandirian Keuangan Daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan PDRB.

2. Jumlah Penduduk

Pengujian variabel Jumlah Penduduk menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk secara individu berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di DIY. Hasil ini sama dengan temuan yang dilakukan oleh peneliti

sebelumnya, yaitu Darmanto (2012). Peningkatan Jumlah Penduduk akan meningkatkan daya beli masyarakat di daerah. Peningkatan daya beli masyarakat ini tentu akan menjadikan tambahan pendapatan bagi daerah, sehingga kemandirian keuangan daerah meningkat. Selain itu, jumlah penduduk yang menempati suatu daerah juga akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jumlah Penduduk yang semakin besar, maka akan menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Adanya tuntutan tersebut menjadikan pemerintah terdorong untuk meningkatkan kinerja (dalam hal ini kemandirian keuangan daerah) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Jumlah Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Jumlah Tenaga Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian Darmanto (2012). Jumlah Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah disebabkan masih adanya tingkat pengangguran terbuka. Pemerintah daerah semestinya mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di daerahnya (Suyono, 2010).

4. Sumber Daya Alam

Pengujian variabel Sumber Daya Alam dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Alam berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh Jolianis (2014), bahwa Sumber Daya Alam berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Pengaruh Sumber Daya Alam terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di DIY bernilai positif. Hal ini berarti bahwa dengan pemanfaatan/pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal oleh pemerintah daerah memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang diterima dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan.

Persentase kontribusi sektor alam (Pertanian dan Penggalian) terhadap PDRB mengalami fluktuasi yang cukup berarti. Selain itu, apabila dibandingkan dengan kontribusi sektor lain, sektor alam bukan merupakan kontributor terbesar bagi PDRB. Berikut ini distribusi persentase PDRB Provinsi DIY tahun 2006-2013.

Tabel 14. Distribusi Persentase PDRB DIY Tahun 2006-2013

Sektor	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	\bar{X}
Pertanian	18,86	18,22	18,33	18,16	17,26	16,08	15,9	15,18	17,54
Penggalian	0,72	0,76	0,72	0,69	0,67	0,71	0,69	0,68	0,71
Industri	14,15	13,82	13,36	13,01	13,27	13,48	12,51	12,79	13,37
Listrik,gas,air	0,87	0,91	0,91	0,93	0,92	0,91	0,92	0,93	0,91
Konstruksi	9,01	9,47	9,57	9,59	9,7	9,89	9,95	10,01	9,60
Perdagangan	20,36	20,5	20,67	20,74	20,83	20,84	21,11	21,27	20,72
Pengangkutan	10,05	10,25	10,41	10,61	10,7	10,98	11,08	11,17	10,58
Keuangan	9,08	9,27	9,32	9,49	9,62	9,87	10,31	10,39	9,57
Jasa	16,91	16,8	16,71	16,79	17,04	17,25	17,54	17,57	17,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan tabel 14 di atas, diketahui bahwa perekonomian DIY mengalami pergeseran, dari perekonomian agraris menuju niaga jasa. Secara angka, sektor industri terus mengalami peningkatan, akan tetapi persentase

kontribusinya terhadap PDRB cenderung turun. Hal ini menunjukkan ada sektor lain yang berkembang lebih pesat, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sepanjang tahun 2006-2013, selain menjadi kontributor terbesar pada PDRB, sektor perdagangan, hotel dan restoran juga konsisten mengalami kenaikan. Hal ini kemungkinan besar terkait dengan nama besar yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pelajar, kota budaya dan kota pariwisata, sehingga sektor perdagangan, hotel dan restoran lebih berkembang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. PDRB memiliki nilai t-hitung sebesar 4,323822 dan probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB secara individu berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah daerah mempunyai jumlah kas (pendapatan) yang cukup untuk melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah itu sendiri.
2. Jumlah Penduduk memiliki nilai t-hitung sebesar 1,755586 dan probabilitas sebesar 0,0890 lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk secara individu signifikan dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Jumlah Tenaga Kerja memiliki nilai t-hitung sebesar -0,975828 dan probabilitas sebesar 0,3367 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Tenaga Kerja secara individu tidak signifikan dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.
4. Sumber Daya Alam memiliki nilai t-hitung sebesar 2,112521 dan probabilitas sebesar 0,0428 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan

bahwa variabel Sumber Daya Alam secara individu berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

5. Nilai F hitung sebesar 78,33860 dengan probabilitas sebesar 0,000000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen (PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja dan Sumber Daya Alam) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kemandirian Keuangan Daerah).

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu sebagai berikut.

1. Periode waktu penelitian pendek, yaitu dari tahun 2006 sampai 2013.
2. Penelitian dilakukan tanpa memisahkan ke dalam kriteria tertentu, misalnya daerah kota/*non* kota.
3. Penelitian ini hanya menganalisis 4 variabel independen saja, padahal masih banyak faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.

C. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
 - a. Peningkatan PDRB terbukti meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan capaian PDRB setiap tahunnya.
 - b. Jumlah Penduduk suatu daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, oleh karenanya, pertumbuhan penduduk yang terjadi sebaiknya diimbangi dengan perbaikan kualitas dari penduduk itu sendiri,

sehingga tercipta jumlah penduduk yang berkualitas dan terjadi peningkatan kemandirian keuangan daerah.

- c. Perlu adanya peningkatan kompetensi tenaga kerja yang ada, sehingga jumlah tenaga kerja memiliki produktivitas dan daya saing yang tinggi.
- d. Pergeseran perekonomian dari agraris ke niaga jasa memberikan dampak yang baik. Hal ini berarti pemerintah lebih menggali potensi daerah agar tercipta Kemandirian Keuangan Daerah yang lebih mandiri.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Apabila tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, lebih baik menambahkan variabel yang lebih bervariasi dan jumlah observasi dalam penelitian ditambah. Memisahkan observasi ke dalam kriteria tertentu, misalnya daerah kota/*non* kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hafidh, Aula. 2013. Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 18 No. 2, Oktober 2013.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPS. 2015. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2015*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2014. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2013. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2013*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2012. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2012*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2011. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2011*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2010. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2010*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2009. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2009*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2008. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2008*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2007. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2006/2007*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.

- BPS. 2015. *Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2014*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2014. *Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2013*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. 2013. *Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2012*. Yogyakarta: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Darmanto, Habib Candra. 2012. Pengaruh Population, Employment, Size dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Gujarati, Damodar & Dawn, Porter. 2013. *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Patriati, Ratri. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Putri, Titin Kartika. 2014. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah*. Universitas Jember.
- Soleh, Chabib & Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokusmedia.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Suprpto, Tri. 2006. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Suyono. 2010. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Wijaya, H.A.W. 2007. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarna, Jaka. 2010. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Journal of Rural and Development*. Vol. 1 No. 2, Agustus 2010.

LAMPIRAN

1. Data Penelitian

Tahun	Kabupaten /Kota	Rasio Kemandirian (%)	PDRB (milyar Rp)	JPD	JTK	SDA (%)
2006	Bantul	0.0734	3299.646	859729	430771	0.2572
2007	Bantul	0.0786	3448.949	872866	440259	0.2533
2008	Bantul	0.0682	3618.06	866061	491765	0.2532
2009	Bantul	0.1005	3779.948	899312	499319	0.2527
2010	Bantul	0.0827	3967.928	911503	468822	0.2444
2011	Bantul	0.1092	4177.201	921263	472076	0.2297
2012	Bantul	0.1246	4400.313	927958	488773	0.2262
2013	Bantul	0.1475	4645.476	947066	472808	0.2168
2006	Gunung Kidul	0.0565	2830.583	675140	405680	0.417
2007	Gunung Kidul	0.0479	2941.288	675359	396671	0.407
2008	Gunung Kidul	0.0478	3070.298	675471	418601	0.4093
2009	Gunung Kidul	0.054	3199.316	675474	415756	0.4152
2010	Gunung Kidul	0.0533	3330.08	675382	372189	0.3984
2011	Gunung Kidul	0.0564	3474.288	677998	358807	0.3856
2012	Gunung Kidul	0.0623	3642.562	684740	414815	0.3828
2013	Gunung Kidul	0.0672	3825.35	700192	420454	0.371
2006	Kulon Progo	0.0785	1524.848	382661	218280	0.282
2007	Kulon Progo	0.0739	1587.63	384326	219155	0.2786
2008	Kulon Progo	0.0727	1662.37	385937	210505	0.2837
2009	Kulon Progo	0.066	1728.304	387493	212963	0.2853
2010	Kulon Progo	0.0763	1781.227	388869	211069	0.2697
2011	Kulon Progo	0.0679	1869.338	390207	203425	0.2734
2012	Kulon Progo	0.0839	1963.028	393221	218042	0.2725
2013	Kulon Progo	0.0957	2062.182	403203	228572	0.2648
2006	Sleman	0.129	5309.059	1015521	462745	0.1778
2007	Sleman	0.1462	5553.593	1035032	505672	0.1722
2008	Sleman	0.1486	5838.246	1054751	537999	0.1743
2009	Sleman	0.1578	6099.557	1074673	530634	0.1694
2010	Sleman	0.1488	6373.2	1093110	531929	0.1624
2011	Sleman	0.1729	6704.1	1107304	561894	0.1517
2012	Sleman	0.1894	7069.229	1114833	544438	0.1497
2013	Sleman	0.2365	7471.898	1141684	568419	0.1437
2006	Yogyakarta	0.1858	4572.504	392799	177200	0.0048
2007	Yogyakarta	0.1853	4776.401	391821	222729	0.0041
2008	Yogyakarta	0.1839	5021.149	390783	233335	0.0037

Tahun	Kabupaten /Kota	Rasio Kemandirian (%)	PDRB (milyar Rp)	JPD	JTK	SDA (%)
2009	Yogyakarta	0.2153	5244.851	389685	236976	0.0034
2010	Yogyakarta	0.22	5505.942	388685	191139	0.0032
2011	Yogyakarta	0.2405	5816.568	390553	202393	0.0032
2012	Yogyakarta	0.2922	6151.679	394012	201640	0.0029
2013	Yogyakarta	0.2925	6498.9	402709	195818	0.0028

2. Data Diolah (LN)

Tahun	Kabupaten /Kota	Rasio Kemandirian	LN (PDRB)	LN (JPD)	LN (JTK)	SDA
2006	Bantul	0.0734	8.1016	13.6644	12.9733	0.2572
2007	Bantul	0.0786	8.1458	13.6795	12.9951	0.2533
2008	Bantul	0.0682	8.1937	13.6717	13.1058	0.2532
2009	Bantul	0.1005	8.2375	13.7094	13.121	0.2527
2010	Bantul	0.0827	8.286	13.7229	13.058	0.2444
2011	Bantul	0.1092	8.3374	13.7335	13.0649	0.2297
2012	Bantul	0.1246	8.3894	13.7407	13.0997	0.2262
2013	Bantul	0.1475	8.4436	13.7611	13.0664	0.2168
2006	Gunung Kidul	0.0565	7.9482	13.4227	12.9133	0.417
2007	Gunung Kidul	0.0479	7.9866	13.423	12.8909	0.407
2008	Gunung Kidul	0.0478	8.0295	13.4232	12.9447	0.4093
2009	Gunung Kidul	0.054	8.0707	13.4232	12.9379	0.4152
2010	Gunung Kidul	0.0533	8.1108	13.423	12.8272	0.3984
2011	Gunung Kidul	0.0564	8.1531	13.4269	12.7905	0.3856
2012	Gunung Kidul	0.0623	8.2004	13.4368	12.9356	0.3828
2013	Gunung Kidul	0.0672	8.2494	13.4591	12.9491	0.371
2006	Kulon Progo	0.0785	7.3297	12.8549	12.2935	0.282
2007	Kulon Progo	0.0739	7.37	12.8592	12.2975	0.2786
2008	Kulon Progo	0.0727	7.416	12.8634	12.2573	0.2837
2009	Kulon Progo	0.066	7.4549	12.8675	12.2689	0.2853
2010	Kulon Progo	0.0763	7.4851	12.871	12.2599	0.2697
2011	Kulon Progo	0.0679	7.5333	12.8744	12.2231	0.2734
2012	Kulon Progo	0.0839	7.5822	12.8821	12.2924	0.2725
2013	Kulon Progo	0.0957	7.6315	12.9072	12.3396	0.2648
2006	Sleman	0.129	8.5772	13.8309	13.0449	0.1778
2007	Sleman	0.1462	8.6222	13.8499	13.1336	0.1722
2008	Sleman	0.1486	8.6722	13.8688	13.1956	0.1743

Tahun	Kabupaten /Kota	Rasio Kemandirian	LN (PDRB)	LN (JPD)	LN (JTK)	SDA
2009	Sleman	0.1578	8.716	13.8875	13.1818	0.1694
2010	Sleman	0.1488	8.7599	13.9045	13.1843	0.1624
2011	Sleman	0.1729	8.8105	13.9174	13.2391	0.1517
2012	Sleman	0.1894	8.8635	13.9242	13.2075	0.1497
2013	Sleman	0.2365	8.9189	13.948	13.2506	0.1437
2006	Yogyakarta	0.1858	8.4278	12.8811	12.085	0.0048
2007	Yogyakarta	0.1853	8.4714	12.8786	12.3137	0.0041
2008	Yogyakarta	0.1839	8.5214	12.8759	12.3602	0.0037
2009	Yogyakarta	0.2153	8.565	12.8731	12.3757	0.0034
2010	Yogyakarta	0.22	8.6136	12.8705	12.1608	0.0032
2011	Yogyakarta	0.2405	8.6685	12.8753	12.218	0.0032
2012	Yogyakarta	0.2922	8.7245	12.8841	12.2142	0.0029
2013	Yogyakarta	0.2925	8.7794	12.906	12.1849	0.0028

3. Deskripsi Statistik

	KEMANDIRIAN	PDRB	JPD	JTK	SDA
Mean	12.47425	4145.425	692067.1	364863.4	754052.3
Median	9.810000	3896.000	680622.0	410247.5	949351.0
Maximum	29.25000	7471.000	1141547.	568419.0	1419726.
Minimum	4.780000	1524.000	373934.0	177200.0	17624.00
Std. Dev.	6.942674	1693.557	277411.4	135397.0	460028.3
Skewness	0.847799	0.107128	0.166871	-0.085004	-0.451549
Kurtosis	2.710012	1.989748	1.492099	1.399454	1.923472
Jarque-Bera	4.931913	1.777524	3.975250	4.317751	3.290832
Probability	0.084928	0.411165	0.137020	0.115455	0.192932
Sum	498.9700	165817.0	27682682	14594537	30162091
Sum Sq. Dev.	1879.828	1.12E+08	3.00E+12	7.15E+11	8.25E+12
Observations	40	40	40	40	40

4. Uji Spesifikasi Model

a. Uji Chow

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: KEMANDIRIAN
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.446444	(4,31)	0.0003
Cross-section Chi-square	26.934744	4	0.0000

Model Common Effect

Dependent Variable: KEMANDIRIAN?
Method: Pooled Least Squares
Date: 03/23/16 Time: 14:18
Sample: 2006 2013
Included observations: 8
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.121317	0.121179	1.001141	0.3236
PDRB?	0.091244	0.017861	5.108690	0.0000
JPD?	0.020695	0.052285	0.395803	0.6947
JTK?	-0.076743	0.059731	-1.284808	0.2073
SDA?	-0.218696	0.064694	-3.380437	0.0018
R-squared	0.907580	Mean dependent var		0.124743
Adjusted R-squared	0.897017	S.D. dependent var		0.069427
S.E. of regression	0.022280	Akaike info criterion		-4.653814
Sum squared resid	0.017373	Schwarz criterion		-4.442704
Log likelihood	98.07627	Hannan-Quinn criter.		-4.577483
F-statistic	85.92597	Durbin-Watson stat		0.685058
Prob(F-statistic)	0.000000			

Model Fixed Effect

Dependent Variable: KEMANDIRIAN?

Method: Pooled Least Squares

Date: 03/23/16 Time: 14:19

Sample: 2006 2013

Included observations: 8

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.522940	2.737821	-2.382530	0.0235
PDRB?	0.208370	0.048191	4.323822	0.0001
JPD?	0.398540	0.227013	1.755586	0.0890
JTK?	-0.046319	0.047466	-0.975828	0.3367
SDA?	0.915555	0.433394	2.112521	0.0428
Fixed Effects (Cross)				
_BANTUL--C	-0.182019			
_GUNUNGKIDUL--C	-0.227342			
_KULONPROGO--C	0.227799			
_SLEMAN--C	-0.207327			
_YOGYAKARTA--C	0.388889			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.952867	Mean dependent var		0.124743
Adjusted R-squared	0.940703	S.D. dependent var		0.069427
S.E. of regression	0.016906	Akaike info criterion		-5.127182
Sum squared resid	0.008860	Schwarz criterion		-4.747184
Log likelihood	111.5436	Hannan-Quinn criter.		-4.989787
F-statistic	78.33860	Durbin-Watson stat		1.105644
Prob(F-statistic)	0.000000			

b. Uji Hausman

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: KEMANDIRIAN

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	29.785776	4	0.0000

Model Random Effect

Dependent Variable: KEMANDIRIAN?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/23/16 Time: 14:22

Sample: 2006 2013

Included observations: 8

Cross-sections included: 5

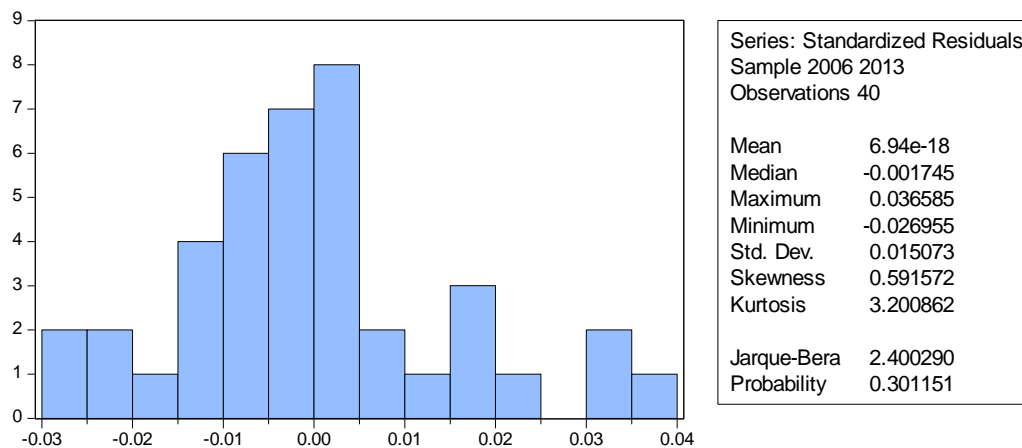
Total pool (balanced) observations: 40

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.121317	0.091952	1.319356	0.1956
PDRB?	0.091244	0.013553	6.732503	0.0000
JPD?	0.020695	0.039674	0.521610	0.6052
JTK?	-0.076743	0.045324	-1.693189	0.0993
SDA?	-0.218696	0.049091	-4.454919	0.0001
Random Effects (Cross)				
_BANTUL--C	-2.21E-11			
_GUNUNGKIDUL--C	-1.84E-11			
_KULONPROGO--C	3.56E-11			
_SLEMAN--C	2.41E-11			
_YOGYAKARTA--C	-1.92E-11			
Effects Specification				
		S.D.	Rho	
Cross-section random		3.60E-07	0.0000	
Idiosyncratic random		0.016906	1.0000	
Weighted Statistics				
R-squared	0.907580	Mean dependent var	0.124742	
Adjusted R-squared	0.897017	S.D. dependent var	0.069427	
S.E. of regression	0.022280	Sum squared resid	0.017373	
F-statistic	85.92597	Durbin-Watson stat	0.685058	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.907580	Mean dependent var	0.124743	
Sum squared resid	0.017373	Durbin-Watson stat	0.685058	

5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



b. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: LOG(RESID?²)

Method: Pooled Least Squares

Date: 03/23/16 Time: 14:47

Sample: 2006 2013

Included observations: 8

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-726.7453	462.4679	-1.571450	0.1262
PDRB?	-9.744584	8.140372	-1.197069	0.2404
JPD?	63.56655	38.34659	1.657684	0.1075
JTK?	-4.416159	8.017902	-0.550787	0.5857
SDA?	19.04175	73.20821	0.260104	0.7965
Fixed Effects (Cross)				
_BANTUL—C	-21.36025			
_GUNUNGKIDUL—C	-9.756286			
_KULONPROGO—C	21.53856			
_SLEMAN—C	-26.07016			
_YOGYAKARTA—C	35.64813			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.154996	Mean dependent var	-10.04030
Adjusted R-squared	-0.063070	S.D. dependent var	2.769733
S.E. of regression	2.855741	Akaike info criterion	5.131648
Sum squared resid	252.8130	Schwarz criterion	5.511645
Log likelihood	-93.63295	Hannan-Quinn criter.	5.269043
F-statistic	0.710776	Durbin-Watson stat	2.914994
Prob(F-statistic)	0.680063		

c. Uji Multikolinearitas

	PDRB	JPD	JTK	SDA
PDRB	1.000000	0.307836	0.055597	0.192005
JPD	0.307836	1.000000	0.038773	-0.194287
JTK	0.055597	0.038773	1.000000	0.177737
SDA	0.192005	-0.194287	0.177737	1.000000

d. Uji Autokorelasi

$n = 40$
 $k = 4$
 $dL = 1,285$
 $dU = 1,721$
 $4-dU = 2,279$
 $d \text{ (awal)} = 1,105644$
 $d \text{ (penyembuhan)} = 1,960787$
 Tidak Ada Autokorelasi : $dU < d < 4-dU$

Penyembuhan Autokorelasi dengan Cochrane Orcutt

Dependent Variable: RESID?

Method: Pooled Least Squares

Date: 03/23/16 Time: 14:34

Sample (adjusted): 2008 2013

Included observations: 6 after adjustments

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.001966	0.002786	-0.705824	0.4874
RESID?(-1)	0.195956	0.224811	0.871647	0.3924
RESID?(-2)	0.103280	0.230497	0.448076	0.6583
Fixed Effects (Cross)				
_BANTUL—C	0.000770			
_GUNUNGKIDUL—C	-0.002162			
_KULONPROGO—C	-0.007441			
_SLEMAN--C	0.001541			
_YOGYAKARTA--C	0.007292			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.154218	Mean dependent var	-0.002788	
Adjusted R-squared	-0.066421	S.D. dependent var	0.014320	
S.E. of regression	0.014788	Akaike info criterion	-5.389081	
Sum squared resid	0.005030	Schwarz criterion	-5.062135	
Log likelihood	87.83621	Hannan-Quinn criter.	-5.284488	
F-statistic	0.698962	Durbin-Watson stat	1.960787	
Prob(F-statistic)	0.653180			

6. Laporan Ralisasi Anggaran Kabupaten/Kota DI Yogyakarta 2006-2013



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI APBD

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2006

	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	2006	Dalam Rupiah BERLEBIH
			AUDITED	(BERKURANG)
A	PENDAPATAN			
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	31,779,625,336.79	44,005,310,869.67	12,225,685,532.88
	Pajak Daerah	5,501,466,000.00	9,836,299,528.00	4,334,833,528.00
	Retribusi Daerah	19,875,810,100.00	22,412,839,917.00	2,537,029,817.00
	Bagian Laba Usaha Daerah	2,873,759,676.79	2,579,134,676.79	(294,625,000.00)
	Lain-lain PAD yg sah	3,528,589,560.00	9,177,036,747.88	5,648,447,187.88
2	DANA PERIMBANGAN	544,674,728,172.00	555,614,340,014.95	10,939,611,842.95
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	12,067,723,091.00	22,016,134,017.00	9,948,410,926.00
	Dana Alokasi Umum	470,847,000,000.00	470,847,000,000.00	0.00
	Dana Alokasi Khusus	33,890,000,000.00	33,890,000,000.00	0.00
	Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	27,870,005,081.00	28,861,205,997.95	991,200,916.95
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	19,502,500,000.00	0.00	(19,502,500,000.00)
	Bantuan Dana Kontinjensi	19,502,500,000.00	0.00	(19,502,500,000.00)
	JUMLAH PENDAPATAN	595,956,853,508.79	599,619,650,884.62	3,662,797,375.83
B	BELANJA			
1	APARATUR DAERAH	138,116,174,007.00	118,338,774,610.59	(19,777,399,396.41)
	Belanja Administrasi Umum	114,067,812,036.00	97,376,948,762.59	(16,690,863,273.41)
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	15,598,056,340.00	12,931,418,687.00	(2,666,637,653.00)
	Belanja Modal	8,450,305,631.00	8,030,407,161.00	(419,898,470.00)
2	PELAYANAN PUBLIK	491,864,568,013.84	426,793,361,322.79	(65,071,206,691.05)
	Belanja Administrasi Umum	274,664,478,300.00	248,232,383,883.00	(26,432,094,417.00)
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	37,944,748,462.00	36,908,235,994.59	(1,036,512,467.41)
	Belanja Modal	80,002,619,915.00	57,572,370,060.00	(22,430,249,855.00)
	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan keuangan	48,996,041,600.00	43,404,030,124.00	(5,592,011,476.00)
	Belanja tak Terduga	50,256,679,736.84	40,676,341,261.20	(9,580,338,475.64)
	JUMLAH BELANJA	629,980,742,020.84	545,132,135,933.38	(84,848,606,087.46)
	SURPLUS DEFISIT	(34,023,888,512.05)	54,487,514,951.24	88,511,403,463.29
C	PEMBIAYAAN			
1	PENERIMAAN DAERAH	36,765,119,311.87	36,985,119,311.87	220,000,000.00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	36,765,119,311.87	36,765,119,311.87	0.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00
2	PENGELUARAN DAERAH	2,741,230,800.00	3,003,993,002.26	262,762,202.26
	Penyertaan Modal	2,626,000,000.00	2,888,762,326.00	262,762,326.00
	Pembayaran Hutang Pokok Jatuh Tempo	115,230,800.00	115,230,676.26	(123.74)
	PEMBIAYAAN NETTO	34,023,888,511.87	33,981,126,309.61	(42,762,202.26)
3	SISA LEBIH TAHUN BERJALAN	0.00	88,468,641,260.85	88,468,641,260.85

BANTUL, JUNI 2007
BUPATI BANTUL

HM. IDHAM SAMAWI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2006
 AUDITED

REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN	519.249.089.143,00	527.352.228.328,13	(8.103.139.185,13)
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	30.235.598.650,00	29.801.036.248,67	434.562.401,33
1.1.1.	Pajak Daerah	2.935.859.750,00	3.389.990.508,00	(454.130.758,00)
1.1.2.	Retribusi Daerah	18.545.480.010,00	18.327.422.191,00	218.057.819,00
1.1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.595.118.890,00	1.608.249.564,82	(13.130.674,82)
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	7.159.140.000,00	6.475.373.984,85	683.766.015,15
1.2.	Dana Perimbangan	487.413.490.493,00	496.521.378.289,46	(9.107.887.796,46)
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	12.060.000.000,00	20.498.366.993,00	(8.438.366.993,00)
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	432.868.000.000,00	432.868.000.000,00	0,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	29.080.000.000,00	29.080.000.000,00	0,00
1.2.4.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi	13.405.490.493,00	14.075.011.296,46	(669.520.803,46)
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah	1.600.000.000,00	1.029.813.790,00	570.186.210,00
1.3.2.	Restitusi PPh Pasal 21	1.600.000.000,00	1.029.813.790,00	570.186.210,00
II	BELANJA	543.824.565.981,20	503.624.606.065,30	40.199.959.915,90
2.1.	APARATUR DAERAH	313.458.039.781,70	292.245.744.892,27	21.212.294.889,43
2.1.1.	Belanja Administrasi Umum	292.901.421.061,70	276.155.708.352,27	16.745.712.709,43
2.1.1.1.	Belanja Pegawai/Personalia	263.866.066.936,70	249.985.297.395,52	13.880.769.541,18
2.1.1.2.	Belanja Barang dan jasa	20.379.458.775,00	19.045.076.479,75	1.334.382.295,25
2.1.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.290.230.000,00	2.308.110.830,00	982.119.170,00
2.1.1.4.	Belanja Pemeliharaan	5.365.665.350,00	4.817.223.647,00	548.441.703,00
2.1.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	15.640.189.000,00	11.671.200.390,00	3.968.988.610,00
2.1.2.1.	Belanja Pegawai/Personalia	3.843.179.600,00	3.077.869.500,00	765.310.100,00
2.1.2.2.	Belanja Barang dan jasa	8.505.990.400,00	5.979.960.940,00	2.526.029.460,00
2.1.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.480.002.000,00	1.927.889.200,00	552.112.800,00
2.1.2.4.	Belanja Pemeliharaan	811.017.000,00	685.480.750,00	125.536.250,00

REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5
2.1.3.	Belanja Modal	4.916.429.720,00	4.418.836.150,00	497.593.570,00
2.1.3.4	Belanja Modal Instalasi	10.000.000,00	9.950.000,00	50.000,00
2.1.3.5	Belanja Modal Jaringan	26.200.000,00	22.615.200,00	3.584.800,00
2.1.3.6	Belanja Modal Bangunan Gedung	763.134.720,00	426.005.250,00	337.129.470,00
2.1.3.9	Belanja Modal Alat-alat Angkutan	1.066.820.000,00	1.059.438.000,00	7.382.000,00
2.1.3.10	Belanja Modal Alat-alat Bengkel	20.000.000,00	19.950.000,00	50.000,00
2.1.3.11	Belanja Modal Alat-alat Pengolahan	70.000.000,00	67.250.000,00	2.750.000,00
2.1.3.12	Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.640.700.000,00	2.518.978.950,00	121.721.050,00
2.1.3.13	Belanja Modal Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi	224.400.000,00	202.258.300,00	22.141.700,00
2.1.3.15	Belanja Modal Alat-alat Laboratorium	9.025.000,00	7.735.000,00	1.290.000,00
2.1.3.16	Belanja Modal Buku/Pustaka	46.150.000,00	45.250.450,00	899.550,00
2.1.3.17	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	40.000.000,00	39.405.000,00	595.000,00
2.2.	PELAYANAN PUBLIK	181.919.226.767,50	164.949.667.415,00	16.969.559.352,50
2.2.1.	Belanja Administrasi Umum	6.815.331.805,50	6.402.318.649,00	413.013.156,50
2.2.1.1.	Belanja Pegawai/Personalia	1.569.786.805,50	1.535.353.246,00	34.433.559,50
2.2.1.2.	Belanja Barang dan jasa	4.393.896.000,00	4.055.863.314,00	338.032.686,00
2.2.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	70.590.000,00	53.500.000,00	17.090.000,00
2.2.1.4.	Belanja Pemeliharaan	781.059.000,00	757.602.089,00	23.456.911,00
2.2.2.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	54.378.550.700,00	47.860.706.579,00	6.517.844.121,00
2.2.2.1.	Belanja Pegawai/Personalia	13.124.391.025,00	11.105.477.750,00	2.018.913.275,00
2.2.2.2.	Belanja Barang dan jasa	34.977.603.475,00	31.346.950.682,00	3.630.652.793,00
2.2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.476.036.000,00	2.107.304.940,00	368.731.060,00
2.2.2.4.	Belanja Pemeliharaan	3.800.520.200,00	3.300.973.207,00	499.546.993,00
2.2.3.	Belanja Modal	120.725.344.262,00	110.686.642.187,00	10.038.702.075,00
2.2.3.1	Belanja Modal Tanah	15.170.975.000,00	12.573.644.996,00	2.597.330.004,00
2.2.3.2	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	39.619.275.000,00	36.229.828.111,00	3.389.446.889,00
2.2.3.3	Belanja Modal Bangunan Air (Irigasi)	5.887.343.862,00	5.648.026.175,00	239.317.687,00
2.2.3.4	Belanja Modal Instalasi	3.298.200.000,00	2.761.614.500,00	536.585.500,00
2.2.3.5	Belanja Modal Jaringan	241.220.000,00	237.088.000,00	4.132.000,00
2.2.3.6	Belanja Modal Bangunan Gedung	45.714.614.400,00	44.190.480.575,00	1.524.133.825,00
2.2.3.7	Belanja Modal Monumen	38.000.000,00	37.434.000,00	566.000,00

REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5
2.2.3.8	Belanja Modal Alat-alat Besar	1.428.000.000,00	0,00	1.428.000.000,00
2.2.3.10	Belanja Modal Alat-alat Bengkel	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00
2.2.3.11	Belanja Modal Alat-alat Pengolahan	9.500.000,00	9.380.000,00	120.000,00
2.2.3.12	Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.099.516.000,00	1.999.905.080,00	99.610.920,00
2.2.3.13	Belanja Modal Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi	306.900.000,00	293.787.250,00	13.112.750,00
2.2.3.14	Belanja Modal Alat-alat Kedokteran	4.259.650.000,00	4.103.040.600,00	156.609.400,00
2.2.3.15	Belanja Modal Alat-alat Laboratorium	1.188.060.000,00	1.178.243.000,00	9.817.000,00
2.2.3.16	Belanja Modal Buku/Pustaka	252.820.000,00	250.724.400,00	2.095.600,00
2.1.3.17	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.2.3.18	Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
2.3.	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	43.297.299.432,00	41.678.098.758,03	1.619.200.673,97
2.3.4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	43.297.299.432,00	41.678.098.758,03	1.619.200.673,97
2.3.4.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa	1.206.466.432,00	493.766.891,03	712.699.540,97
2.3.4.04	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	22.121.200.000,00	21.476.725.000,00	644.475.000,00
2.3.4.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	18.495.618.000,00	18.253.591.867,00	242.026.133,00
2.3.4.06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi	90.300.000,00	90.300.000,00	0,00
2.3.4.08	Bantuan Kepada Partai Politik	900.000.000,00	880.000.000,00	20.000.000,00
2.3.4.11	Subsidi PDAM	483.715.000,00	483.715.000,00	0,00
2.4.	BELANJA TIDAK TERSANGKA	5.150.000.000,00	4.751.095.000,00	398.905.000,00
2.4.5	Belanja Tidak Tersangka	5.150.000.000,00	4.751.095.000,00	398.905.000,00
2.4.5.1	Belanja Tak Tersangka SURPLUS (DEVISIT)	5.150.000.000,00 (24.575.476.838,20)	4.751.095.000,00 23.727.622.262,83	398.905.000,00 (48.303.099.101,03)
III	PEMBIAYAAN			48.303.099.101,03
3.1.	Penerimaan Daerah	29.674.726.838,20	29.674.726.838,20	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	29.674.726.838,20	29.674.726.838,20	0,00
3.2.	Pengeluaran Daerah	5.099.250.000,00	5.099.076.910,26	(48.303.099.101,03)
3.2.2.	Penyertaan Modal	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00

REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5
3.2.3.	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	99.250.000,00	99.076.910,26	173.089,74
3.2.4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (tahun 2006)	(0,00)	48.303.272.190,77	(48.303.272.190,77)

BUPATI GUNUNGKIDUL

SUHARTO



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

PERHITUNGAN ANGGARAN	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Lebih/Kurang Rp
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak daerah	2.642.330.962,00	3.320.982.073,18	678.651.111,18
Pendapatan Retribusi daerah	18.656.733.531,00	20.018.580.396,00	1.361.846.865,00
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.391.952.411,76	3.781.700.430,17	(610.251.981,59)
Lain-Lain PAD yang Sah	4.383.897.380,00	8.082.012.223,00	3.698.114.843,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	30.074.914.284,76	35.203.275.122,35	5.128.360.837,59
PENDAPATAN TRANSFER			
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-			
DANA PERIMBANGAN			
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.450.710.000,00	17.844.066.201,00	5.393.356.201,00
Dana Alokasi Umum	344.035.000.000,00	344.035.000.000,00	-
Dana Alokasi Khusus	32.865.000.000,00	32.865.000.000,00	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	389.350.710.000,00	394.744.066.201,00	5.393.356.201,00
TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI			
Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	10.890.538.590,46	16.567.634.973,91	5.677.096.383,45
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi	10.890.538.590,46	16.567.634.973,91	5.677.096.383,45
Total Pendapatan Transfer	400.241.248.590,46	411.311.701.174,91	11.070.452.584,45
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Dana Penyesuaian / Kontinjensi	0,00	0,00	-
Penerimaan kelebihan pembayaran pajak	0,00	0,00	-
Pendapatan lainnya	850.000.000,00	1.856.826.485,00	1.006.826.485,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	850.000.000,00	1.856.826.485,00	1.006.826.485,00
JUMLAH PENDAPATAN	431.166.162.875,22	448.371.802.782,26	17.205.639.907,04
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai/Personalia	248.164.684.780,00	238.634.204.484,00	(9.530.480.296,00)
Belanja Barang dan Jasa	100.104.693.806,00	95.067.448.394,50	(5.037.245.411,50)
Bunga	161.259.517,00	106.127.292,28	(55.132.224,72)
Subsidi	0,00	0,00	-
Hibah	0,00	0,00	-
Bantuan Sosial	8.173.018.500,00	8.168.898.500,00	(4.120.000,00)
Jumlah Belanja Operasional	356.603.656.603,00	341.976.678.670,78	(14.626.977.932,22)
BELANJA MODAL			
Belanja Tanah	2.970.432.920,00	2.934.276.745,00	(36.156.175,00)
Belanja Peralatan dan Mesin	14.973.776.554,00	13.888.313.863,00	(1.085.462.691,00)
Belanja Gedung dan Bangunan	17.327.135.020,00	17.427.528.225,00	100.393.205,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.070.071.110,00	37.256.820.844,00	(813.250.266,00)
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.421.311.800,00	3.203.609.200,00	(217.702.600,00)
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja Modal	76.762.727.404,00	74.710.548.877,00	(2.052.178.527,00)
BELANJA TAK TERDUGA			
Belanja Tak Terduga	1.564.097.996,69	1.457.427.854,16	(106.670.142,53)
Jumlah Belanja Tak terduga	1.564.097.996,69	1.457.427.854,16	(106.670.142,53)
JUMLAH BELANJA	434.930.482.003,69	418.144.655.401,94	(16.785.826.601,75)

TRANSFER**TRANSFER BAGI HASIL KE DESA**

Bagi Hasil Pajak/Retribusi	933.262.500,00	933.262.500,00	-
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	36.053.564.200,00	35.697.739.400,00	(355.824.800,00)
Bantuan Keuangan untuk Instansi	4.794.887.576,00	4.134.204.810,00	(660.682.766,00)
Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa	41.781.714.276,00	40.765.206.710,00	(1.016.507.566,00)
Jumlah Transfer	41.781.714.276,00	40.765.206.710,00	(1.016.507.566,00)

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

476.712.196.279,69	458.909.862.111,94	(17.802.334.167,75)
---------------------------	---------------------------	----------------------------

SURPLUS/DEFISIT

(45.546.033.404,47)	(10.538.059.329,68)	35.007.974.074,79
----------------------------	----------------------------	--------------------------

PEMBIAYAAN**PENERIMAAN DAERAH**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	23.094.905.108,47	23.094.905.108,47	-
Pencairan dari dana cadangan	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	-
Penerimaan pinjaman dan obligasi	210.000.000,00	0,00	(210.000.000,00)
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
Penerimaan Piutang	6.758.244.311,00	2.241.858.914,00	(4.516.385.397,00)
Jumlah Penerimaan	52.063.149.419,47	47.336.764.022,47	(4.726.385.397,00)

PENGELUARAN DAERAH

Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	-
Penyertaan Modal	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-
Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	92.000.000,00	91.387.284,80	(612.715,20)
Penguatan Modal	1.064.500.000,00	1.064.500.000,00	-
Pemberian Pinjaman/Dana Talangan	0,00	0,00	-
Jumlah Pengeluaran	5.156.500.000,00	5.155.887.284,80	(612.715,20)

PEMBIAYAAN NETTO

46.906.649.419,47	42.180.876.737,67	(4.725.772.681,80)
--------------------------	--------------------------	---------------------------

SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN

1.360.616.015,00	31.642.817.407,99	30.282.201.392,99
-------------------------	--------------------------	--------------------------

Wates, 20 Juli 2007
BUPATI KULON PROGO

H. TOYO SANTOSO DIPO



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2006
(Auditan)

NO	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
A.	PENDAPATAN			
1.	Pendapatan Asli Daerah			
	Pendapatan Pajak Daerah	32.750.000.000,00	37.979.313.374,32	(5.229.313.374,32)
	Pendapatan Retribusi Daerah	33.405.992.000,00	34.867.831.814,83	(1.461.839.814,83)
	Pendapatan dr Kekayan yg dipisah	3.372.204.050,00	5.048.288.039,65	(1.676.083.989,65)
	Lain-lain PAD yang sah	6.264.124.280,00	12.814.661.888,60	(6.550.537.608,60)
	Jumlah PAD	75.792.320.330,00	90.710.095.117,40	(14.917.774.787,40)
2.	Pendapatan Transfer			
	Transfer Pemerintah Pusat			
	Dana Bagi Hasil Pajak	35.500.000.000,00	49.208.735.240,00	(13.708.735.240,00)
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	302.636.208,00	(302.636.208,00)
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	-
	Dana Alokasi Umum	485.397.000.000,00	485.397.000.000,00	-
	Dana Alokasi Khusus	25.800.000.000,00	25.860.000.000,00	(60.000.000,00)
		546.697.000.000,00	560.768.371.448,00	(14.071.371.448,00)
	Transfer Pemerintah Propinsi			
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.800.000.000,00	49.531.420.688,89	(17.731.420.688,89)
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	1.919.693.500,00	(1.919.693.500,00)
		31.800.000.000,00	51.451.114.188,89	(19.651.114.188,89)
	Jumlah Pendapatan Transfer	578.497.000.000,00	612.219.485.636,89	(33.722.485.636,89)
				-
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	654.289.320.330,00	702.929.580.754,29	(48.640.260.424,29)
B.	BELANJA			-
1.	Belanja Operasi			
	Belanja Pegawai	427.336.430.419,00	370.635.197.503,86	56.701.232.915,14
	Belanja Barang	121.768.601.808,60	107.746.047.883,74	14.022.553.924,86
	Belanja Bunga	143.619.653,94	143.619.653,94	-
	Belanja Subsidi	0,00	-	-
	Belanja Hibah	0,00	-	-
	Belanja Sosial	37.037.050.200,00	34.050.335.606,00	2.986.714.594,00
	Jumlah Belanja Operasi	586.285.702.081,54	512.575.200.647,54	73.710.501.434,00

2.	Belanja Modal			
	Belanja Tanah	8.254.062.500,00	2.320.424.892,00	5.933.637.608,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	17.520.046.250,00	12.150.118.637,00	5.369.927.613,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	60.423.574.390,00	50.609.104.970,01	9.814.469.419,99
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.599.040.550,00	14.310.185.299,00	5.288.855.251,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.267.063.850,00	1.032.739.500,00	6.234.324.350,00
	Belanja Aset Lainnya	0,00	-	-
	Jumlah Belanja Modal	113.063.787.540,00	80.422.573.298,01	32.641.214.241,99
3.	Belanja Tak Terduga			-
	Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	3.748.417.382,00	251.582.618,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	3.748.417.382,00	251.582.618,00
	JUMLAH BELANJA	703.349.489.621,54	596.746.191.327,55	106.603.298.293,99
C.	TRANSFER			
	Transfer Bagi Hasil Ke Desa			
	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	13.370.650.000,00	13.019.217.200,00	351.432.800,00
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	-	-
	Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa	13.370.650.000,00	13.019.217.200,00	351.432.800,00
	JUMLAH TRANSFER	13.370.650.000,00	13.019.217.200,00	351.432.800,00
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER	716.720.139.621,54	609.765.408.527,55	106.954.731.093,99
	SURPLUS/DEFISIT	(62.430.819.291,54)	93.164.172.226,74	(155.594.991.518,28)
D.	PEMBIAYAAN			-
1.	Penerimaan Pembiayaan			
	Penggunaan SiLPA	51.689.560.066,48	51.691.306.850,48	(1.746.784,00)
	Pinjaman Dalam Negeri	20.079.004.150,52	-	20.079.004.150,52
	Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	71.768.564.217,00	51.691.306.850,48	20.077.257.366,52
2.	Pengeluaran Pembiayaan			-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	-
	Penguatan Modal	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman ke P. Pus	137.744.925,40	137.744.925,40	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.337.744.925,40	9.337.744.925,40	-
	PEMBIAYAAN NETTO	62.430.819.291,60	42.353.561.925,08	20.077.257.366,52
	SISA LEBIH/KURANG			
	PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,06	135.517.734.151,82	(135.517.734.151,82)

Sleman, Juni 2007

BUPATI SLEMAN

Drs. H. Ibnu Subiyanto, Akt.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2006

NO	URAIAN	APBD 2006		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
A	PENDAPATAN			
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1	Pendapatan Pajak Daerah	42.678.850.000,00	43.997.150.025,00	103,09
2	Pendapatan Retribusi Daerah	25.028.663.530,00	24.704.781.396,00	98,71
3	Pendapatan Bagian Laba Usaha Daerah	6.885.906.000,00	7.722.505.202,62	112,15
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	20.664.074.470,00	19.995.019.680,90	96,76
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	95.257.494.000,00	96.419.456.304,52	101,22
II	PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN			
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	28.890.203.091,00	40.145.140.985,00	138,96
2	Dana Alokasi Umum	316.832.000.000,00	316.832.000.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	100,00
4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi	53.342.919.168,00	35.373.712.961,12	66,31
	Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan	403.865.122.259,00	397.150.853.946,12	98,34
III	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH			
1	Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah	-	-	-
2	Dana Penyesuaian Ad Hoc	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
3	Hibah	11.202.353.000,00	10.451.927.071,00	93,30
	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang sah	26.202.353.000,00	25.451.927.071,00	97,14
	JUMLAH PENDAPATAN	525.324.969.259,00	519.022.237.321,64	98,80
B	BELANJA			
I	BELANJA APARATUR DAERAH			
1	Belanja Administrasi Umum	43.174.324.789,00	36.737.618.808,30	85,09
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	20.004.284.464,00	17.833.888.429,00	89,15
3	Belanja Modal / Pembangunan	3.382.189.140,00	3.294.805.480,00	97,42
	Jumlah Belanja Aparatur Daerah	66.560.798.393,00	57.866.312.717,30	86,94
II	BELANJA PELAYANAN PUBLIK			
1	Belanja Administrasi Umum	289.580.297.710,00	238.144.704.482,00	82,24
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	63.431.326.526,00	55.504.444.118,00	87,50
3	Belanja Modal / Pembangunan	100.031.802.300,00	76.107.251.594,00	76,08
4	<i>Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan</i>	<i>64.356.241.495,00</i>	<i>59.411.518.162,00</i>	<i>92,32</i>
5	<i>Belanja Tak Tersangka</i>	<i>25.881.685.000,00</i>	<i>9.734.745.979,00</i>	<i>37,61</i>
	Jumlah Belanja Pelayanan Publik	543.281.353.031,00	438.902.664.335,00	80,79
	JUMLAH BELANJA	609.842.151.424,00	496.768.977.052,30	81,46
	SURPLUS/DEFISIT	(84.517.182.165,00)	22.253.260.269,34	(26,33)
C	PEMBIAYAAN			
I	PENERIMAAN			
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	76.983.970.898,00	76.983.970.898,15	100,00
2	Transfer dari Dana Cadangan	-	-	-
3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	17.920.000.000,00	-	-
4	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
5	Hibah	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	94.903.970.898,00	76.983.970.898,15	81,12

NO	URAIAN	APBD 2006		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
II	PENGELUARAN			
1	Transfer Ke Dana Cadangan	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	5.093.766.520,00	5.083.766.520,00	99,80
3	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah	2.492.258.116,00	2.245.004.321,52	90,08
4	Pemberian Piutang Daerah	1.375.000.000,00	1.298.000.000,00	94,40
5	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	1.425.764.097,00	90.610.460.325,97	6.355,22
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.386.788.733,00	99.237.231.167,49	955,42
	JUMLAH PEMBIAYAAN	84.517.182.165,00	(22.253.260.269,34)	(26,33)

Walikota Yogyakarta

H. Herry Zudianto



KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2007
(AUDITAN)

NO.	U R A I A N	Ref	Jumlah (Rp.)		lebih/ kurang dari Anggaran (Rp.)
			Anggaran setelah perubahan	Realisasi	
A	PENDAPATAN	521	693.827.536.928,60	727.836.911.979,62	34.009.375.051,02
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1)	46.240.676.769,60	57.229.726.493,62	10.989.049.724,02
1.1	Pendapatan Pajak Daerah		8.104.466.000,00	10.191.535.467,00	2.087.069.467,00
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah		27.329.701.674,00	30.808.408.803,00	3.478.707.129,00
1.3	Pendapatan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah		2.881.430.036,63	3.014.646.125,98	133.216.089,35
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		7.925.079.058,97	13.215.136.097,64	5.290.057.038,67
2	PENDAPATAN TRANSFER	2)	639.246.432.229,00	667.789.977.586,00	18.543.545.357,00
2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		593.244.921.429,00	602.943.019.186,00	9.698.097.757,00
	Dana Bagi Hasil Pajak		20.939.913.829,00	28.902.601.269,00	7.962.687.440,00
	Dana Bagi Hasil Pajak bukan pajak (SDA)		303.007.600,00	2.038.417.917,00	1.735.410.317,00
	Dana Alokasi Umum		524.293.000.000,00	524.293.000.000,00	-
	Dana Alokasi Khusus		47.709.000.000,00	47.709.000.000,00	-
2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		17.500.000.000,00	22.142.804.400,00	4.642.804.400,00
	Dana Otonomi Khusus		-	-	-
	Dana Penyesuaian		17.500.000.000,00	22.142.804.400,00	4.642.804.400,00
2.3	Transfer Pemerintah Provinsi		28.501.510.800,00	32.704.154.000,00	4.202.643.200,00
	Pendapatan bagi Hasil Pajak		28.501.510.800,00	32.704.154.000,00	4.202.643.200,00
	Pendapatan bagi Hasil Lainnya		-	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	3)	8.340.427.930,00	12.817.207.900,00	4.476.779.970,00
3.1	Pendapatan Hibah		250.000.000,00	450.250.000,00	200.250.000,00
3.2	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-
3.3	Pendapatan Lainnya		8.090.427.930,00	12.366.957.900,00	4.276.529.970,00
B	BELANJA	522	763.254.947.189,05	676.835.481.623,06	(86.419.465.565,99)
1	BELANJA OPERASI	1)	634.824.347.227,97	569.369.236.435,06	(65.455.110.792,91)
1.1	Belanja Pegawai		467.041.631.050,00	423.004.092.327,00	(44.037.538.723,00)
1.2	Belanja Barang		94.970.889.096,00	79.397.675.863,00	(15.573.213.233,00)
1.3	Belanja Bunga		120.145.200,00	106.417.530,06	(13.727.669,94)
1.4	Belanja Subsidi		-	-	-
1.5	Belanja Hibah		-	-	-
1.6	Belanja Bantuan Sosial		46.283.315.746,97	42.957.998.215,00	(3.325.317.531,97)
1.7	Belanja Bantuan Keuangan		26.408.366.135,00	23.903.052.500,00	(2.505.313.635,00)
2	BELANJA MODAL	2)	124.544.141.850,00	105.464.206.588,00	(19.079.935.262,00)
2.1	Belanja Tanah		15.140.225.000,00	13.851.330.400,00	(1.288.894.600,00)
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin		18.057.248.750,00	16.842.861.403,00	(1.214.387.347,00)
2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		45.905.208.000,00	31.978.797.300,00	(13.926.410.700,00)
2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan		37.952.308.100,00	35.454.012.985,00	(2.498.295.115,00)
2.5	Belanja Aset Tetap lainnya		7.489.152.000,00	7.337.204.500,00	(151.947.500,00)
2.6	Belanja Aset Lainnya		-	-	-
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3)	2.013.014.511,08	546.492.000,00	(1.466.522.511,08)
3.1	Belanja tidak terduga		2.013.014.511,08	546.492.000,00	(1.466.522.511,08)

NO.	U R A I A N	Ref	Jumlah (Rp.)		lebih/ kurang dari Anggaran (Rp.)
			Anggaran setelah perubahan	Realisasi	
4	TRANSFER		1.873.443.600,00	1.455.546.600,00	(417.897.000,00)
4.1	TRANSFER BAGI HSL KE KAB/KOTA/DESA	4)	1.873.443.600,00	1.455.546.600,00	(417.897.000,00)
	Bagi Hasil Pajak		1.296.125.600,00	1.062.572.600,00	(233.553.000,00)
	Bagi Hasil Retribusi		577.318.000,00	392.974.000,00	(184.344.000,00)
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-	-
					-
	Surplus/ (Defisit)		(69.427.410.260,45)	51.001.430.356,56	120.428.840.617,01
C	PEMBIAYAAN	523			
1	PENERIMAAN DAERAH	1)	88.468.641.260,45	88.468.641.260,85	0,40
1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		88.468.641.260,45	88.468.641.260,85	0,40
1.2	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan		-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-
1.6	Penerimaan Hutang Daerah		-	-	-
2	PENGELUARAN DAERAH	2)	19.041.231.000,00	19.756.301.722,82	715.070.722,82
2.1	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		18.926.000.000,00	19.641.071.046,56	715.071.046,56
2.3	Pembayaran Pokok Hutang		115.231.000,00	115.230.676,26	(323,74)
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-
	Pembiayaan Neto		69.427.410.260,45	68.712.339.538,03	(715.070.722,42)
					-
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		-	119.713.769.894,59	119.713.769.894,59

Bantul, 24 Juni 2008
BUPATI BANTUL

DRS. H.M. IDHAM SAMAWI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

NOMOR	URAIAN	REALISASI 2007	%	REALISASI 2006
1	2	4	5	6
I	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.105.382.324,00	128,47	3.389.990.508,00
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	15.093.480.315,00	108,43	18.327.422.191,00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.401.288.012,96	141,25	1.608.249.564,82
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.278.205.894,59	238,27	6.475.373.984,85
	Jumlah Pendapatan Asli daerah	28.878.356.546,15	129,92	29.801.036.248,67
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER			
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
1.2.1.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	23.316.204.134,00	115,17	20.190.168.913,00
1.2.1.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	308.712.307,00		308.198.080,00
1.2.1.3.	Dana Alokasi Umum	459.851.000.000,00	100,00	432.868.000.000,00
1.2.1.4.	Dana Alokasi Khusus	49.167.000.000,00	100,00	29.080.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan	532.642.916.441,00	100,55	482.446.366.993,00
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			
1.2.2.1.	Dana Otonomi Khusus	0,00		0,00
1.2.2.2.	Dana Penyesuaian	5.392.553.400,00		0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.392.553.400,00		0,00
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi			
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil pajak	21.412.246.700,00	126,04	14.075.011.296,46
1.2.3.2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00		0,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	21.412.246.700,00	126,04	14.075.011.296,46
	Total Pendapatan Transfer	559.447.716.541,00	102,33	496.521.378.289,46
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
1.3.1.	Pendapatan Hibah	13.175.000.000,00	164,69	0,00
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	1.144.049.949,00		0,00
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	500.000,00		1.029.813.790,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	14.319.549.949,00	178,99	1.029.813.790,00
	JUMLAH PENDAPATAN	602.645.623.036,15	104,46	527.352.228.328,13
2	BELANJA			
2.1	BELANJA OPERASI			
2.1.1.	Belanja Pegawai	322.053.623.342,20	93,08	265.703.997.891,27
2.1.2.	Belanja Barang	77.890.055.599,00	84,07	76.301.286.477,25
2.1.3.	Belanja Bunga	76.390.552,14	99,21	84.649.601,75
2.1.4.	Belanja Subsidi	0,00		0,00
2.1.5.	Belanja Hibah	0,00		0,00
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	26.540.849.150,00	119,90	0,00
	Jumlah Belanja Operasi	426.860.918.643,34	92,57	342.085.903.970,27
2.2	BELANJA MODAL			
2.2.1.	Belanja Tanah	7.059.339.500,00	60,63	12.573.644.996,00
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	16.039.153.826,00	91,10	12.569.911.680,00
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	43.242.061.515,00	94,74	44.653.919.825,00
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.628.790.648,00	93,61	44.909.121.966,00
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.602.818.200,00	88,26	398.875.850,00
2.2.6.	Belanja Aset Lainnya	0,00		0,00

	Jumlah Belanja Modal	117.571.963.699,00	90,23	115.105.479.337,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.856.345.000,00	38,54	4.751.095.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	1.856.345.000,00	38,54	4.751.095.000,00
	JUMLAH BELANJA	546.289.227.332,34	91,62	461.946.507.307,27
2.4	TRANSFER			
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA			
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	915.871.000,00	99,49	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	1.375.540.500,00	0,00	493.766.861,03
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	27.100.112.533,00	95,86	41.184.331.867,00
	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	29.384.524.033,00	95,13	41.678.098.758,03
	Jumlah Belanja dan Transfer	575.683.751.365,34	91,84	503.624.606.065,30
	SURPLUS/DEFISIT	26.961.871.670,81		23.727.622.262,83
3	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	48.303.272.190,77	100,00	29.674.726.838,20
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00		0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00		0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00		0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.888.426.450,00	97,99	0,00
	Jumlah Penerimaan	52.191.698.640,77	99,85	29.674.726.838,20
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00		0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi)	2.330.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman	69.326.910,00	100,00	99.076.910,26
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00		0,00
	Jumlah Pengeluaran	2.399.326.910,00	100,00	5.099.076.910,26
	PEMBIAYAAN NETO	49.792.371.730,77		24.575.649.927,94
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	75.754.243.401,58		48.303.272.190,77



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

PERHITUNGAN ANGGARAN	2007		Lebih/Kurang
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	Rp
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak daerah	3.148.025.000,00	3.366.877.168,76	218.852.168,76
Pendapatan Retribusi daerah	20.585.388.800,00	22.355.637.683,00	1.770.248.883,00
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.331.533.869,00	3.805.164.956,58	(526.368.912,42)
Lain-Lain PAD yang Sah	7.279.431.882,00	9.110.153.695,00	1.830.721.813,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	35.344.379.551,00	38.637.833.503,34	3.293.453.952,34
PENDAPATAN TRANSFER			
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-			
DANA PERIMBANGAN			
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.780.798.746,00	20.928.278.545,37	2.147.479.799,37
Dana Alokasi Umum	374.760.000.000,00	378.145.129.800,00	3.385.129.800,00
Dana Alokasi Khusus	42.119.000.000,00	42.156.538.164,00	37.538.164,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA			
Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang – Pusat	13.500.000.000,00	12.150.000.000,00	(1.350.000.000,00)
TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI			
dari Propinsi	21.928.312.300,00	29.331.209.200,00	7.402.896.900,00
Jumlah Pendapatan Transfer			
Total Pendapatan Transfer	471.088.111.046,00	482.711.155.709,37	11.623.044.663,37
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	275.130.000,00	107.110.000,00	(168.020.000,00)
Dana Darurat	-	-	-
Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	1.481.714.397,95	1.481.714.397,95
Pen. Kelebihan Pembyrn PPh Pasal 21 Gaji PNS	-	-	-
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	275.130.000,00	1.588.824.397,95	1.313.694.397,95
JUMLAH PENDAPATAN	506.707.620.597,00	522.937.813.610,66	16.230.193.013,66
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai/Personalia	309.067.121.690,00	292.800.835.972,37	16.266.285.717,63
Belanja Barang dan Jasa	82.079.186.397,00	74.605.437.192,00	7.473.749.205,00
Bunga	108.000.000,00	95.258.147,34	12.741.852,66
Subsidi	170.000.000,00	170.000.000,00	-
Hibah	1.229.500.000,00	1.229.500.000,00	-
Bantuan Sosial	7.997.000.000,00	7.573.782.525,00	423.217.475,00
Bantuan Keuangan	22.932.146.345,00	22.421.441.155,00	510.705.190,00
Jumlah Belanja Operasional	423.582.954.432,00	398.896.254.991,71	24.686.699.440,29

BELANJA MODAL			
Belanja Tanah	9.060.762.120,00	5.809.120.550,00	3.251.641.570,00
Belanja Peralatan dan Mesin	23.539.970.070,00	20.521.396.705,00	3.018.573.365,00
Belanja Gedung dan Bangunan	37.263.928.265,00	30.170.542.500,00	7.093.385.765,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.360.064.025,00	36.284.808.529,00	3.075.255.496,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.557.961.000,00	940.985.818,00	1.616.975.182,00
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	111.782.685.480,00	93.726.854.102,00	18.055.831.378,00
BELANJA TAK TERDUGA			
Belanja Tak Terduga	2.284.305.486,00	216.998.000,00	2.067.307.486,00
Jumlah Belanja Tak terduga	2.284.305.486,00	216.998.000,00	2.067.307.486,00
JUMLAH BELANJA	537.649.945.398,00	492.840.107.093,71	44.809.838.304,29
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA			
Bagi Hasil Pajak/Retribusi	-	-	-
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	-	-	-
Bantuan Keuangan untuk Instansi	-	-	-
Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa	-	-	-
Jumlah Transfer	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	537.649.945.398,00	492.840.107.093,71	44.809.838.304,29
SURPLUS/DEFISIT	(30.942.324.801,00)	30.097.706.516,95	(28.579.645.290,63)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN DAERAH			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	30.678.427.823,50	30.664.700.323,50	13.727.500,00
Pencairan dari dana cadangan	-	-	-
Penerimaan pinjaman dan obligasi	-	-	-
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
Penerimaan Piutang	8.489.246.977,50	2.854.313.374,00	5.634.933.603,50
Jumlah Penerimaan	39.167.674.801,00	33.519.013.697,50	5.648.661.103,50
PENGELUARAN DAERAH			
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
Penyertaan Modal	5.783.000.000,00	5.783.000.000,00	-
Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	92.000.000,00	91.387.284,80	612.715,20
Penguatan Modal	2.350.350.000,00	2.350.350.000,00	-
Pemberian Pinjaman/Dana Talangan	-	-	-
Jumlah Pengeluaran	8.225.350.000,00	8.224.737.284,80	612.715,20
PEMBIAYAAN NETTO	30.942.324.801,00	25.294.276.412,70	5.648.048.388,30
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	55.391.982.929,65	(55.391.982.929,65)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2007
(Auditan)

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
A.	PENDAPATAN				
1	Pendapatan Asli Daerah	V.5.2.a.1)			
	Pendapatan Pajak Daerah		42.000.000.000,00	50.287.665.731,91	(8.287.665.731,91)
	Pendapatan Retribusi Daerah		39.299.207.160,00	40.965.628.030,57	(1.666.420.870,57)
	Pendapatan dr kekayaan yg Dipisahkan		5.634.323.740,00	5.732.297.630,18	(97.973.890,18)
	Lain-lain PAD yang sah		7.962.915.820,00	23.670.957.328,34	(15.708.041.508,34)
	Jumlah PAD		94.896.446.720,00	120.656.548.721,00	(25.760.102.001,00)
2	Pendapatan Transfer				
a.	Transfer Pemerintah Pusat_ Dana Perimbangan	V.5.2.a.2)a)			
	Dana Bagi Hasil Pajak & Non Pajak		62.079.000.000,00	68.345.288.361,00	(6.266.288.361,00)
	Dana Alokasi Umum		543.065.000.000,00	543.065.000.000,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus		10.151.000.000,00	10.151.000.000,00	0,00
	Dana Penyes & Otonomi Khusus		8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
	Bant Keu dr Pempus untuk Pendidikan		0,00	5.613.532.600,00	(5.613.532.600,00)
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat		623.295.000.000,00	635.174.820.961,00	(11.879.820.961,00)
b.	Transfer Pemerintah Propinsi	V.5.2.a.2)b)			
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop & Pemda Lainnya		48.924.981.600,00	52.201.913.300,00	(3.276.931.700,00)
	Bantuan Keu dr Prop atau Pemda Lainnya		8.600.000.000,00	12.799.500.000,00	(4.199.500.000,00)
	Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi		57.524.981.600,00	65.001.413.300,00	(7.476.431.700,00)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah				
	Pendapatan Hibah	V.5.2.a.3)a)	0,00	2.062.081.450,00	(2.062.081.450,00)
	Penerimaan kompensasi PPh	V.5.2.a.3)b)		2.109.321.660,00	(2.109.321.660,00)
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	4.171.403.110,00	(4.171.403.110,00)
	JUMLAH PENDAPATAN		775.716.428.320,00	825.004.186.092,00	(49.287.757.772,00)
B.	BELANJA				
1	Belanja Operasi	V.5.2.b.1			
	Belanja Pegawai/Personalia		533.823.068.952,22	468.668.466.025,00	65.154.602.927,22
	Belanja Barang		117.576.601.333,60	98.462.427.536,50	19.114.173.797,10
	Belanja Bunga		144.000.000,00	136.590.831,64	7.409.168,36
	Belanja Subsidi		7.750.204.585,00	7.743.887.439,00	6.317.146,00
	Belanja Bantuan Sosial		48.511.290.033,80	39.938.343.865,00	8.572.946.168,80
	Jumlah Belanja Operasi		707.805.164.904,62	614.949.715.697,14	92.855.449.207,48
2	Belanja Modal	V.5.2.b.2			
	Belanja Tanah		28.551.406.400,00	12.219.081.813,00	16.332.324.587,00
	Belanja Peralatan dan Mesin		29.346.454.450,00	22.030.162.300,00	7.316.292.150,00
	Belanja Gedung dan Bangunan		60.326.995.979,00	50.763.440.056,86	9.563.555.922,14
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		27.558.190.883,00	23.012.501.691,00	4.545.689.192,00

NO.	URAIAN	Ref.	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
	Belanja Aset Tetap Lainnya	V.5.2.b.3	7.450.725.150,00	1.535.008.240,12	5.915.716.909,88
	Jumlah Belanja Modal		153.233.772.862,00	109.560.194.100,98	43.673.578.761,02
	3 Belanja Tidak Terduga		7.933.301.990,00	0,00	7.933.301.990,00
	JUMLAH BELANJA		868.972.239.756,62	724.509.909.798,12	144.462.329.958,50
4	Transfer	V.5.2.c.			
	Transfer Bagi Hasil ke Desa				
	Blj Bg Hsl kpd Prop/Kab/Kota & Pemdes		18.803.945.253,20	18.615.842.894,24	188.102.358,96
	Blj Bant Keu kpd Prop/Kab/Kota & Pemdes		9.062.420.000,00	8.988.223.200,00	74.196.800,00
	Jumlah Transfer		27.866.365.253,20	27.604.066.094,24	262.299.158,96
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		896.838.605.009,82	752.113.975.892,36	144.724.629.117,46
	SURPLUS/DEFISIT		(121.122.176.689,82)	72.890.210.199,64	(194.012.386.889,46)
D. PEMBIAYAAN					
1	Penerimaan Pembiayaan	V.5.2.d.1)			
	SiLPA Tahun Sebelumnya		135.517.734.154,82	135.517.734.151,82	3,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00
	Pengembalian Piutang		0,00	1.750.823.200,00	(1.750.823.200,00)
	Kompensasi Pajak Penghasilan		0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		135.517.734.154,82	137.268.557.351,82	(1.750.823.197,00)
2	Pengeluaran Pembiayaan	V.5.2.d.2)			
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda		9.750.000.000,00	9.750.000.000,00	0,00
	Pembayaran Pokok Ulang		138.000.000,00	137.744.928,40	255.071,60
	Pemberian Pinjaman Daerah		4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
	Restitusi		7.557.465,00	7.557.465,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		14.395.557.465,00	14.395.302.393,40	255.071,60
	PEMBIAYAAN NETTO		121.122.176.689,82	122.873.254.958,42	(1.751.078.268,60)
	SILPA	V.5.2.e	0,00	195.763.465.158,06	(195.763.465.158,06)

Sleman, 15 Juli 2008

BUPATI SLEMAN,

Drs. H. Ibnu Subiyanto, Akt.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007

NO.	URAIAN	Jumlah		Lebih/Kurang dari Anggaran (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1	Pajak Daerah	49.274.000.000,00	54.783.202.892,00	5.509.202.892,00
1.1.2	Retribusi Daerah	29.092.692.000,00	29.197.466.013,00	104.774.013,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.799.505.000,00	8.783.239.359,78	(16.265.640,22)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.996.685.000,00	21.334.442.677,53	4.337.757.677,53
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	104.162.882.000,00	114.098.350.942,31	9.935.468.942,31
1.2	PENDAPATAN TRANSFER			
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	49.705.420.217,00	46.842.560.104,00	(2.862.860.113,00)
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	553.060.454,00	486.664.434,00	(66.396.020,00)
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	365.042.000.000,00	365.042.000.000,00	-
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	26.788.000.000,00	26.788.000.000,00	-
	Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan	442.088.480.671,00	439.159.224.538,00	(2.929.256.133,00)
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA			
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	-	2.917.756.400,00	2.917.756.400,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	-	2.917.756.400,00	2.917.756.400,00
1.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-
	Total Pendapatan Transfer	442.088.480.671,00	442.076.980.938,00	(11.499.733,00)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH			
1.3.1	Pendapatan Hibah	4.988.769.000,00	6.288.730.100,00	1.299.961.100,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	43.849.620.300,00	53.184.790.500,00	9.335.170.200,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	48.838.389.300,00	59.473.520.600,00	10.635.131.300,00
	JUMLAH PENDAPATAN	595.089.751.971,00	615.648.852.480,31	20.559.100.509,31
2	BELANJA			
2.1	BELANJA OPERASI			
2.1.1	Belanja Pegawai	392.723.577.238,00	332.205.140.033,00	(60.518.437.205,00)
2.1.2	Belanja Barang	102.454.936.051,00	85.667.260.473,00	(16.787.675.578,00)
2.1.3	Belanja Bunga	707.120.555,00	707.120.553,55	(1,45)
2.1.4	Belanja Subsidi	307.192.000,00	306.876.000,00	(316.000,00)
2.1.5	Belanja Hibah	-	-	-
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	62.875.796.994,00	57.696.628.060,00	(5.179.168.934,00)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	559.068.622.838,00	476.583.025.119,55	(82.485.597.718,45)
2.2	BELANJA MODAL			
2.2.1	Belanja Tanah	4.435.310.000,00	4.092.326.400,00	(342.983.600,00)
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	12.413.938.825,00	11.067.578.735,00	(1.346.360.090,00)
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	59.117.570.922,00	50.951.282.032,00	(8.166.288.890,00)
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.991.214.744,00	22.307.082.701,00	(684.132.043,00)
2.2.5	Belanja Aset Tetap lainnya	1.387.060.000,00	1.252.832.300,00	(134.227.700,00)
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	320.700.000,00	311.294.000,00	(9.406.000,00)
	Jumlah Belanja Modal	100.665.794.491,00	89.982.396.168,00	(10.683.398.323,00)

NO.	URAIAN	Jumlah		Lebih/Kurang dari Anggaran (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
3.1	Belanja Tidak Terduga	23.546.970.746,00	2.554.951.274,41	(20.992.019.471,59)
	Jumlah Tidak Terduga	23.546.970.746,00	2.554.951.274,41	(20.992.019.471,59)
2.4	TRANSFER			
2.4.1	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA			
2.4.2	Bagi Hasil Pajak	-	-	-
2.4.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-
2.4.4	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-
	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	683.281.388.075,00	569.120.372.561,96	(114.161.015.513,04)
	SURPLUS/DEFISIT	(88.191.636.104,00)	46.528.479.918,35	134.720.116.022,35
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN			
3.1.1	Penggunaan SILPA	90.610.460.326,00	90.610.460.325,97	(0,03)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	90.610.460.326,00	90.610.460.325,97	(0,03)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	958.824.222,00	958.824.221,52	(0,48)
3.2.4	Penyertaan Pinjaman Daerah	1.460.000.000,00	1.412.000.000,00	(48.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.418.824.222,00	2.370.824.221,52	(48.000.000,48)
	PEMBIAYAAN NETTO	88.191.636.104,00	88.239.636.104,45	48.000.000,45
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	134.768.116.022,80	134.768.116.022,80

Yogyakarta, 30 Juni 2008

Walikota Yogyakarta

H. Herry Zudianto

APBD Tahun 2009				
Daerah	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kota Yogyakarta	
PENDAPATAN	Rp 882.149.788.430	Rp 711.953.527.994	Rp 749.989.016.367	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 88.691.362.690	Rp 38.455.406.172	Rp 161.473.838.210	
Pendapatan Pajak Daerah	Rp 14.108.451.479	Rp 6.875.766.083	Rp 71.852.539.011	
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 58.205.951.445	Rp 21.690.642.796	Rp 23.497.748.962	
Pendapatan Hasil Pengeluaran Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 7.512.838.195	Rp 5.200.730.811	Rp 10.218.454.601	
Lain-lain PAD yang sah	Rp 8.864.121.572	Rp 4.688.266.482	Rp 55.905.095.636	
PENDAPATAN TRANSFER	Rp 755.798.547.739	Rp 655.216.626.822	Rp 574.257.953.157	
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	Rp 668.488.989.539	Rp 609.362.836.722	Rp 517.366.876.957	
Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 44.254.423.902	Rp 28.862.596.605	Rp 66.433.124.320	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp 97.422.637	Rp 764.932.117	Rp 97.422.637	
Dana Alokasi Umum	Rp 568.502.143.000	Rp 508.212.308.000	Rp 414.345.330.000	
Dana Alokasi Khusus	Rp 55.635.000.000	Rp 71.523.000.000	Rp 36.491.000.000	
TRANSFER PEM. PUSAT - LAINNYA	Rp 48.172.499.300	Rp 22.370.625.000	Rp 10.831.673.400	
Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	
Dana Penyesuaian	Rp 48.172.499.300	Rp 22.370.625.000	Rp 10.831.673.400	
TRANSFER PEMPROV	Rp 39.137.058.900	Rp 23.483.165.100	Rp 46.059.402.800	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 39.137.058.900	Rp 23.483.165.100	Rp 46.059.402.800	
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp 37.659.878.000	Rp 18.281.495.000	Rp 14.257.225.000	
Pendapatan Hibah	Rp 68.100.000	Rp 18.281.495.000	Rp 144.825.000	
Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	
Pendapatan Lainnya	Rp 37.591.778.000	Rp -	Rp 14.112.400.000	
BELANJA	Rp 899.804.171.129	Rp 652.368.106.697	Rp 783.851.692.760	
BELANJA OPERASI	Rp 792.019.021.918	Rp 557.392.233.795	Rp 695.351.653.001	
Belanja Pegawai	Rp 560.830.196.490	Rp 462.231.695.650	Rp 461.189.796.523	
Belanja Barang	Rp 118.719.979.086	Rp 68.963.385.843	Rp 141.474.807.279	
Bunga	Rp 78.962.221	Rp 59.872.452	Rp 459.221.795	
Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
Hibah	Rp 29.718.902.000	Rp 1.382.413.750	Rp 49.915.246.350	
Bantuan Sosial	Rp 82.670.982.121	Rp 24.754.866.100	Rp 42.312.581.054	
BELANJA MODAL	Rp 107.353.190.571	Rp 93.848.247.302	Rp 86.735.745.636	
Belanja Tanah	Rp 1.265.320.800	Rp 569.580.000	Rp 2.466.745.100	
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 16.897.162.231	Rp 11.144.307.100	Rp 16.396.567.920	
Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 43.274.719.225	Rp 58.775.210.220	Rp 40.267.206.366	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 44.001.821.635	Rp 22.859.026.862	Rp 24.566.338.000	
Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 1.914.166.680	Rp 500.123.120	Rp 1.972.323.000	
Belanja Aset Lainnya	Rp -	Rp -	Rp 1.066.565.250	
BELANJA TAK TERDUGA	Rp 431.958.640	Rp 1.127.625.600	Rp 1.764.294.123	
Belanja Tak Terduga	Rp 431.958.640	Rp 1.127.625.600	Rp 1.764.294.123	
TRANSFER	Rp 3.962.829.300	Rp 41.876.698.264	Rp -	
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	Rp 3.361.925.800	Rp 2.975.452.014	Rp -	
Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa	Rp 600.903.500	Rp -	Rp -	
Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa	Rp -	Rp 38.901.246.250	Rp -	
Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa	Rp -	Rp -	Rp -	
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (17.654.382.699)	Rp 59.585.421.297	Rp (33.862.676.393)	
PEMBIAYAAN	Rp 82.661.134.609	Rp 39.958.484.276	Rp 132.059.409.743	
Penerimaan Pembiayaan	Rp 84.776.365.285	Rp 41.464.603.686	Rp 143.752.738.195	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp 84.776.365.285	Rp 39.957.654.436	Rp 143.562.038.074	
Pencairan dana cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	
Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp 50.000.000	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp -	Rp 1.477.846.000	Rp -	
Penerimaan Piutang Daerah	Rp -	Rp 29.103.250	Rp 140.700.121	
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 2.115.230.676	Rp 1.506.119.410	Rp 11.693.328.452	
Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000.000	
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp 2.000.000.000	Rp 1.400.000.000	Rp 5.500.000.000	
Pembayaran Pokok Utang	Rp 115.230.676	Rp 106.119.410	Rp 1.193.328.452	
Pemberian Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Rp -	Rp -	Rp -	
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	Rp -	
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	Rp 65.006.751.909	Rp 99.543.905.573	Rp 98.196.733.350	

APBD 2009			
Daerah	Kab. Kulon Progo		Kab. Sleman
PENDAPATAN	Rp	596.428.928.201	Rp 996.182.714.692
BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp	39.358.629.412	Rp 157.231.267.812
Pajak Daerah	Rp	3.549.894.569	Rp 71.044.731.107
Retribusi Daerah	Rp	5.918.692.238	Rp 54.719.438.556
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	5.208.953.134	Rp 9.973.164.267
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp	24.681.089.471	Rp 21.493.933.882
DANA PERIMBANGAN	Rp	494.268.843.933	Rp 717.703.169.280
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp	24.788.201.933	Rp 93.869.391.280
Dana Alokasi Umum	Rp	413.081.642.000	Rp 587.857.778.000
Dana Alokasi Khusus	Rp	56.399.000.000	Rp 35.976.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp	62.801.454.856	Rp 121.248.277.600
Pendapatan Hibah	Rp	13.035.824.000	Rp 120.770.000
Dana Darurat	Rp	-	Rp -
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	21.644.186.200	Rp 68.062.049.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp	15.608.541.000	Rp 36.573.458.600
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	12.366.000.000	Rp 16.492.000.000
Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	146.903.656	Rp -
Dana Insentif Daerah	Rp	-	Rp -
BELANJA	Rp	577.736.996.100	Rp 1.016.026.601.135
BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp	444.766.627.124	Rp 672.286.269.327
BELANJA PEGAWAI	Rp	373.009.926.556	Rp 556.313.854.101
BELANJA BUNGA	Rp	73.480.857	Rp 102.458.157
BELANJA SUBSIDI	Rp	122.260.000	Rp 10.189.618.480
BELANJA HIBAH	Rp	41.711.851.796	Rp 19.401.387.158
BELANJA BANTUAN SOSIAL	Rp	7.006.025.838	Rp 46.289.247.223
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PE	Rp	1.178.075.077	Rp 20.517.574.208
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KO	Rp	21.252.930.000	Rp 19.472.130.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp	412.077.000	Rp -
BELANJA LANGSUNG	Rp	132.970.368.976	Rp 343.740.331.809
BELANJA PEGAWAI	Rp	29.155.721.815	Rp 80.293.674.749
BELANJA BARANG DAN JASA	Rp	63.004.170.636	Rp 147.599.744.505
BELANJA MODAL	Rp	40.810.476.525	Rp 115.846.912.555
SURPLUS/DEFISIT	Rp	18.691.932.101	Rp (19.843.886.444)
PEMBIAYAAN	Rp	26.677.363.614	Rp 183.969.512.983
Penerimaan Daerah	Rp	34.141.233.435	Rp 213.907.757.912
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp	30.014.963.020	Rp 213.907.757.912
Pencairan dana cadangan	Rp	-	Rp -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp	-	Rp -
Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp	-	Rp -
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp	-	Rp -
Penerimaan Piutang Daerah	Rp	4.126.270.415	Rp -
Pengeluaran Daerah	Rp	7.463.869.821	Rp 29.938.244.928
Pembentukan Dana Cadangan	Rp	-	Rp -
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp	3.552.000.000	Rp 23.200.000.000
Pembayaran Pokok Utang	Rp	2.811.869.821	Rp 137.744.928
Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	1.100.000.000	Rp 6.600.500.000
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Rp	-	Rp -
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	Rp	-	Rp -
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	Rp	45.369.295.714	Rp 164.125.626.540



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI APBD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(AUDITED)

Uraian	Anggaran 2009 Rp	Realisasi 2009 Rp	Bertambah/ Berkurang Rp	%	Realisasi 2008 Rp
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	66.969.000.000,00	71.852.539.011,00	4.883.539.011,00	107,29%	62.452.770.490,00
Pendapatan Retribusi Daerah	22.158.537.725,00	23.497.748.962,00	1.339.211.237,00	106,04%	34.940.602.210,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.159.369.381,00	10.218.454.601,27	59.085.220,27	100,58%	8.454.823.854,45
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46.159.491.000,00	55.905.095.635,68	9.745.604.635,68	121,11%	26.583.374.960,27
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	145.446.398.106,00	161.473.838.209,95	16.027.440.103,95	111,02%	132.431.571.514,72
PENDAPATAN TRANSFER					
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil Pajak	71.042.879.869,00	66.433.124.320,00	(4.609.755.549,00)	93,51%	61.081.198.662,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	249.280.000,00	97.422.637,00	(151.857.363,00)	39,08%	164.724.201,00
Dana Alokasi Umum	414.345.330.000,00	414.345.330.000,00	-	100,00%	411.257.232.000,00
Dana Alokasi Khusus	36.491.000.000,00	36.491.000.000,00	-	100,00%	32.238.000.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	522.128.489.869,00	517.366.876.957,00	(4.761.612.912,00)	99,09%	504.741.154.863,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	929.264.600,00	1.010.123.400,00	80.858.800,00	108,70%	1.904.295.999,00
Dana Tunjangan Pendidikan	-	9.821.550.000,00	9.821.550.000,00	-	3.235.932.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	929.264.600,00	10.831.673.400,00	9.902.408.800,00	1165,62%	5.140.227.999,00
Transfer Pemerintah Provinsi					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46.059.402.500,00	46.059.402.800,00	300,00	100,00%	43.333.111.500,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	46.059.402.500,00	46.059.402.800,00	300,00	100,00%	43.333.111.500,00
Jumlah Pendapatan Transfer	569.117.156.969,00	574.257.953.157,00	5.140.796.188,00	100,90%	553.214.494.362,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	144.825.000,00	144.825.000,00	-	100,00%	20.332.060.000,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	962.407.471,00
Pendapatan Lainnya	14.112.400.000,00	14.112.400.000,00	-	100,00%	13.312.400.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	14.257.225.000,00	14.257.225.000,00	-	100,00%	34.606.867.471,00
JUMLAH PENDAPATAN	728.820.780.075,00	749.989.016.366,95	21.168.236.291,95	102,90%	720.252.933.347,72
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	490.280.089.021,00	461.189.796.523,00	(29.090.292.498,00)	94,07%	428.171.470.769,60
Belanja Barang	165.888.063.878,00	141.474.807.279,00	(24.413.256.599,00)	85,28%	90.700.730.390,14
Belanja Bunga	459.221.795,00	459.221.794,86	(0,14)	100,00%	579.027.616,04
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	51.671.837.850,00	49.915.246.350,00	(1.756.591.500,00)	96,60%	22.180.860.900,00
Belanja Bantuan Sosial	45.130.701.000,00	42.312.581.054,00	(2.818.119.946,00)	93,76%	49.587.684.559,00
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	753.429.913.544,00	695.351.653.000,86	(58.078.260.543,14)	92,29%	591.219.774.234,78
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	2.778.225.000,00	2.466.745.100,00	(311.479.900,00)	88,79%	6.208.586.469,00
Belanja Peralatan dan Mesin	18.282.226.305,00	16.396.567.920,00	(1.885.658.385,00)	89,69%	17.216.376.442,00
Belanja Gedung dan Bangunan	44.308.444.680,00	40.267.206.365,80	(4.041.238.314,20)	90,88%	54.477.308.400,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.360.646.700,00	24.566.338.000,00	(794.308.700,00)	96,87%	28.135.315.700,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.378.796.000,00	1.972.323.000,00	(406.473.000,00)	82,91%	998.186.175,00
Belanja Aset Lainnya	1.478.000.000,00	1.066.565.250,00	(411.434.750,00)	72,16%	250.288.700,00
Jumlah Belanja Modal	94.586.338.685,00	86.735.745.635,80	(7.850.593.049,20)	91,70%	107.286.061.886,00

Uraian	Anggaran 2009 Rp	Realisasi 2009 Rp	Bertambah/ Berkurang Rp	%	Realisasi 2008 Rp
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	12.958.513.622,00	1.764.294.123,00	(11.194.219.499,00)	13,61%	60.828.000,00
<i>Jumlah Belanja Tak Terduga</i>	12.958.513.622,00	1.764.294.123,00	(11.194.219.499,00)	13,61%	60.828.000,00
TRANSFER					
Transfer/Bagi Hasil ke Desa					
Bagi Hasil Pajak	-	-			-
Bagi Hasil Retribusi	-	-			-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-			-
<i>Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa</i>	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA	860.974.765.851,00	783.851.692.759,66	(77.123.073.091,34)	91,04%	698.566.664.120,78
SURPLUS/DEFISIT	(132.153.985.776,00)	(33.862.676.392,71)	98.291.309.383,29	25,62%	21.686.269.226,94
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SiLPA TA 2008	143.597.315.073,00	143.562.038.073,54	(35.276.999,46)	99,98%	134.768.116.022,80
Pencairan Dana Cadangan	-	-			-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-			-
Pinjaman Dalam Negeri	-	-			-
Penerimaan Kembali Pinjaman	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	50,00%	-
Penerimaan Piutang Daerah	150.000.000,00	140.700.121,00	(9.299.879,00)	93,80%	125.892.112,00
<i>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</i>	143.847.315.073,00	143.752.738.194,54	(94.576.878,46)	99,93%	134.894.008.134,80
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00%	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-	100,00%	12.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	1.193.329.297,00	1.193.328.451,86	(845,14)	100,00%	982.962.288,20
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-			-
<i>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</i>	11.693.329.297,00	11.693.328.451,86	(845,14)	100,00%	12.982.962.288,20
PEMBIAYAAN NETTO	132.153.985.776,00	132.059.409.742,68	(94.576.033,32)	99,93%	121.911.045.846,60
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TA 2009	-	98.196.733.349,97	98.196.733.349,97		143.597.315.073,54

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDianto

APBD 2010 (Dalam Jutaan Rupiah)					
Uraian	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
Pendapatan	Rp 986.894	Rp 798.249	Rp 633.089	Rp 1.095.629	Rp 815.496
PAD	Rp 81.637	Rp 42.542	Rp 48.281	Rp 163.056	Rp 179.424
Pajak daerah	Rp 16.541	Rp 5.949	Rp 4.310	Rp 80.612	Rp 78.255
Retribusi daerah	Rp 15.978	Rp 25.080	Rp 7.728	Rp 59.111	Rp 32.215
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp 7.425	Rp 4.732	Rp 4.741	Rp 10.170	Rp 11.031
Lain-lain PAD yang sah	Rp 41.692	Rp 6.782	Rp 31.502	Rp 13.165	Rp 57.923
Pendapatan Transfer	Rp 749.631	Rp 723.266	Rp 566.488	Rp 909.887	Rp 614.973
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rp 688.677	Rp 633.692	Rp 485.094	Rp 740.198	Rp 484.628
Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 54.599	Rp 34.689	Rp 29.324	Rp 104.362	Rp 73.460
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Rp -	Rp 135	Rp 2.862	Rp 2.668	Rp 2.125
Dana alokasi umum	Rp 573.512	Rp 521.294	Rp 411.294	Rp 563.321	Rp 395.444
Dana alokasi khusus	Rp 60.566	Rp 77.574	Rp 41.614	Rp 69.847	Rp 13.599
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Rp 18.396	Rp 64.102	Rp 57.617	Rp 84.453	Rp 81.354
Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Dana Penyesuaian	Rp 18.396	Rp 64.102	Rp 57.617	Rp 84.453	Rp 81.354
Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 42.559	Rp 25.472	Rp 23.776	Rp 85.236	Rp 48.991
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 42.559	Rp 25.472	Rp 23.776	Rp 73.869	Rp 48.991
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 11.367	Rp -
Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp 155.626	Rp 32.440	Rp 18.320	Rp 22.685	Rp 21.099
Pendapatan Hibah	Rp 17.196	Rp 14.430	Rp 8.920	Rp 20.785	Rp 13.849
Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Lainnya	Rp 138.429	Rp 18.010	Rp 9.400	Rp 1.900	Rp 7.250
Belanja	Rp 1.010.581	Rp 722.211	Rp 610.930	Rp 1.093.347	Rp 839.866
Belanja Operasi	Rp 883.984	Rp 674.653	Rp 564.187	Rp 989.131	Rp 784.517
Belanja Pegawai	Rp 689.823	Rp 576.372	Rp 461.489	Rp 755.838	Rp 559.147
Belanja Barang	Rp 114.323	Rp 69.125	Rp 66.695	Rp 182.640	Rp 159.120
Belanja Bunga	Rp 65	Rp 52	Rp 63	Rp 78	Rp 380
Belanja Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Belanja Hibah	Rp 17.408	Rp 9.246	Rp 8.044	Rp 18.414	Rp 30.531
Belanja Bantuan sosial	Rp 32.613	Rp 19.859	Rp 8.001	Rp 32.162	Rp 35.340
Belanja Bantuan Keuangan	Rp 29.752	Rp -	Rp 19.897	Rp -	Rp -
Belanja Modal	Rp 123.249	Rp 47.001	Rp 46.582	Rp 99.812	Rp 54.040
Tanah	Rp -	Rp 2.251	Rp 4.179	Rp 70	Rp 4.287
Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp 14.809	Rp 11.217	Rp 25.940	Rp 14.322
Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp 10.804	Rp 6.517	Rp 31.752	Rp 22.849
Jalan, irigasi dan jaringan	Rp -	Rp 18.984	Rp 24.646	Rp 29.450	Rp 11.046
Aset tetap lainnya	Rp -	Rp 153	Rp 23	Rp 12.600	Rp 1.297
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Aset lainnya	Rp 123.249	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 240
Belanja tidak terduga	Rp 3.347	Rp 557	Rp 161	Rp 4.404	Rp 1.310
Belanja tidak terduga	Rp 3.347	Rp 557	Rp 161	Rp 4.404	Rp 1.310
Transfer	Rp 1.776	Rp 42.979	Rp 1.973	Rp 38.255	Rp -
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	Rp -	Rp 1.648	Rp 580	Rp -	Rp -
Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa	Rp -	Rp 1.492	Rp 639	Rp -	Rp -
Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa	Rp 1.776	Rp 39.839	Rp -	Rp 19.529	Rp -
Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa	Rp -	Rp -	Rp 754	Rp 18.726	Rp -
Belanja dan Transfer	Rp 1.012.357	Rp 765.190	Rp 612.903	Rp 1.131.602	Rp 839.866
Pembiayaan	Rp 60.598	Rp 57.222	Rp 42.505	Rp 147.387	Rp 99.343
Penerimaan Pembiayaan	Rp 61.044	Rp 59.308	Rp 47.498	Rp 164.126	Rp 100.105
SiLPA TA sebelumnya	Rp 61.044	Rp 57.667	Rp 45.369	Rp 164.126	Rp 98.197
Pencairan dana cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp -	Rp 1.640	Rp 2.129	Rp -	Rp 1.908
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 446	Rp 2.085	Rp 4.993	Rp 16.738	Rp 762
Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp 281	Rp 1.578	Rp 4.902	Rp 10.500	Rp -
Pembayaran Pokok Utang	Rp 115	Rp 507	Rp 91	Rp 138	Rp 762
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Rp 50	Rp -	Rp -	Rp 6.101	Rp -
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2010
(SETELAH KONVERSI)
(AUDITAN)

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2010	REALISASI 2010		REALISASI 2009	KET.
			Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	1,096,899,222,057.99	1,095,628,887,559.93	99.88	996,182,714,691.84	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	163,530,209,690.15	163,056,459,137.93	99.71	157,231,267,811.84	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75,969,096,600.00	80,611,542,955.52	106.11	71,044,731,106.66	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	58,973,721,680.00	59,110,503,292.07	100.23	54,719,438,555.90	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	10,448,161,337.99	10,169,824,623.38	97.34	9,973,164,266.92	
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	18,139,230,072.16	13,164,588,266.96	72.58	21,493,933,882.36	
1.2	Pendapatan Transfer	909,205,932,367.84	909,887,128,872.00	100.07	822,650,618,280.00	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	737,807,079,540.00	740,198,028,398.00	100.32	717,703,169,280.00	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	102,354,729,965.00	104,361,867,117.00	101.96	93,771,968,643.00	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2,284,157,575.00	2,667,969,281.00	116.80	97,422,637.00	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	563,320,892,000.00	563,320,892,000.00	100.00	587,857,778,000.00	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	69,847,300,000.00	69,847,300,000.00	100.00	35,976,000,000.00	
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	86,168,469,000.00	84,453,294,000.00	98.01	20,393,400,000.00	
1.2.2.1	Dana Tunjangan Pendidikan	86,168,469,000.00	84,453,294,000.00	98.01	20,393,400,000.00	
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	85,230,383,827.84	85,235,806,474.00	100.01	84,554,049,000.00	
1.2.3.1	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	73,863,383,827.84	73,868,806,474.00	100.01	68,062,049,000.00	
1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	11,367,000,000.00	11,367,000,000.00	100.00	16,492,000,000.00	
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	24,163,080,000.00	22,685,299,550.00	93.88	16,300,828,600.00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	22,163,080,000.00	20,785,299,550.00	93.78	120,770,000.00	
1.3.2	Dana Cukai Tembakau	0.00	0.00	0.00	1,285,611,600.00	
1.3.2	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah	0.00	0.00	0.00	14,894,447,000.00	
1.3.6	DPPIP	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	0.00	
1.3.7	DPPID	1,000,000,000.00	900,000,000.00	90.00	0.00	
2	BELANJA	1,244,286,348,597.65	1,131,602,398,904.14	90.94	1,016,026,601,135.37	
2.1	BELANJA OPERASI	1,072,860,038,694.49	989,131,133,924.33	92.20	860,189,984,372.37	
2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	801,509,598,773.49	755,838,243,854.94	94.30	636,607,528,849.82	
2.1.2	Belanja Barang	215,743,125,709.00	182,639,531,636.08	84.66	147,599,744,504.64	
2.1.3	Belanja Bunga	144,000,000.00	77,980,369.31	54.15	102,458,156.61	
2.1.4	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	10,189,618,480.00	
2.1.5	Belanja Hibah	20,280,011,487.00	18,413,622,487.00	90.80	19,401,387,158.00	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	35,183,302,725.00	32,161,755,577.00	91.41	46,289,247,223.30	
2.2	BELANJA MODAL	126,792,132,400.00	99,812,269,370.81	78.72	115,846,912,555.00	
2.2.1	Belanja Tanah	150,000,000.00	69,802,625.00	46.54	2,446,529,845.00	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	39,029,581,719.00	25,939,878,319.00	66.46	21,070,360,360.00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	34,459,278,711.00	31,751,996,688.81	92.14	25,783,008,390.00	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	32,811,902,700.00	29,450,357,528.00	89.76	66,189,393,435.00	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	20,341,369,270.00	12,600,234,210.00	61.94	357,620,525.00	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4,404,158,474.92	4,404,090,314.00	100.00	0.00	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	4,404,158,474.92	4,404,090,314.00	100.00	0.00	
2.4	TRANSFER	40,230,019,028.24	38,254,905,295.00	95.09	39,989,704,208.00	
2.4.1	Transfer bagi Hasil ke Desa	40,230,019,028.24	38,254,905,295.00	95.09	39,989,704,208.00	
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	19,528,558,295.24	19,528,558,295.00	100.00	20,517,574,208.00	
2.4.1.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	20,701,460,733.00	18,726,347,000.00	90.46	19,472,130,000.00	
	Surplus/(Defisit)	(147,387,126,539.66)	(35,973,511,344.21)	24.41	(19,843,886,443.53)	
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Sebelumnya Jumlah	164,125,626,539.66	164,125,626,539.66	100.00	213,907,757,911.59	
		164,125,626,539.66	164,125,626,539.66	100.00	213,907,757,911.59	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.2	Penyertaan Modal	10,500,000,000.00	10,500,000,000.00	100.00	23,200,000,000.00	
3.2.4	Pembayaran Pokok Utang	138,000,000.00	137,744,928.40	99.82	137,744,928.40	

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2010	REALISASI 2010		REALISASI 2009	KET.
			Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.5	Pemberian Pinjaman Daerah (Penguatan Modal) Jumlah	6,100,500,000.00	6,100,500,000.00	100.00	6,600,500,000.00	
		16,738,500,000.00	16,738,244,928.40	99.99	29,938,244,928.40	
	Pembiayaan Netto	147,387,126,539.66	147,387,381,611.26	100.00	183,969,512,983.19	
	SiLPA	0.00	111,413,870,267.05	0.00	164,125,626,539.66	

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI APBD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

Uraian	Reff	Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
PENDAPATAN	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	75.200.000.000,00	78.254.579.242,00	104,06	71.852.539.011,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	29.492.761.000,00	32.214.650.779,00	109,23	23.497.748.962,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c	11.031.304.700,00	11.031.304.700,40	100,00	10.218.454.601,27
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.d	60.147.942.593,00	57.923.105.336,11	96,30	55.905.095.635,68
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		175.872.008.293,00	179.423.640.057,51	102,02	161.473.838.209,95
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.a				
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a.1)	80.998.335.726,00	73.460.190.158,00	90,69	66.433.124.320,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a.2)	249.280.000,00	2.124.930.562,00	852,43	97.422.637,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.3)	395.444.062.000,00	395.444.062.000,00	100,00	414.345.330.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.a.4)	13.599.100.000,00	13.599.100.000,00	100,00	36.491.000.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		490.290.777.726,00	484.628.282.720,00	98,85	517.366.876.957,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.1.1.2.b				
Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.b.1)	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	5.1.1.2.b.2)	83.003.370.525,00	81.353.699.000,00	98,01	1.010.123.400,00
Dana Tunjangan Pendidikan	5.1.1.2.b.3)	-	-	-	9.821.550.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat		83.003.370.525,00	81.353.699.000,00	98,01	10.831.673.400,00
Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.c				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.c.1)	48.986.880.441,00	48.991.022.874,00	100,01	46.059.402.800,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.c.2)	-	-	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		48.986.880.441,00	48.991.022.874,00	100,01	46.059.402.800,00
Jumlah Pendapatan Transfer		622.281.028.692,00	614.973.004.594,00	98,83	574.257.953.157,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.a	12.649.280.000,00	13.849.280.000,00	109,49	144.825.000,00
Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.b	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.c	7.250.000.000,00	7.250.000.000,00	100,00	14.112.400.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		19.899.280.000,00	21.099.280.000,00	106,03	14.257.225.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		818.052.316.985,00	815.495.924.651,51	99,69	749.989.016.366,95
BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	584.733.466.519,00	559.146.974.048,00	95,62	461.189.796.523,00
Belanja Barang	5.1.2.1.b	182.135.924.939,00	159.119.638.920,00	87,36	141.474.807.279,00
Belanja Bunga	5.1.2.1.c	554.537.870,00	379.637.470,43	68,46	459.221.794,86
Belanja Subsidi	5.1.2.1.d	-	-	-	-
Belanja Hibah	5.1.2.1.e	31.026.861.150,00	30.530.575.535,00	98,40	49.915.246.350,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	40.000.495.725,00	35.339.698.475,00	88,35	42.312.581.054,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.1.g	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		838.451.286.203,00	784.516.524.448,43	93,57	695.351.653.000,86
BELANJA MODAL	5.1.2.2				
Belanja Tanah	5.1.2.2.a	9.449.135.000,00	4.287.291.550,00	45,37	2.466.745.100,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	20.010.850.392,00	14.321.567.817,00	71,57	16.396.567.920,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	27.392.240.500,00	22.849.064.073,00	83,41	40.267.206.365,80
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.2.d	12.886.131.657,00	11.046.126.965,00	85,72	24.566.338.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	5.461.402.700,00	1.296.757.800,00	23,74	1.972.323.000,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.f	522.164.300,00	239.624.000,00	45,89	1.066.565.250,00
Jumlah Belanja Modal		75.721.924.549,00	54.040.432.205,00	71,37	86.735.745.635,80

Uraian	Reff	Anggaran 2010 Rp	Realisasi 2010 Rp	%	Realisasi 2009 Rp
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
Belanja Tak Terduga		2.880.959.428,00	1.309.524.008,00	45,45	1.764.294.123,00
<i>Jumlah Belanja Tak Terduga</i>		2.880.959.428,00	1.309.524.008,00	45,45	1.764.294.123,00
TRANSFER	5.1.2.4				
Transfer/Bagi Hasil ke Desa					
Bagi Hasil Pajak		-	-	-	-
Bagi Hasil Retribusi		-	-	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
<i>Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa</i>		-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		917.054.170.180,00	839.866.480.661,43	91,58	783.851.692.759,66
SURPLUS/DEFISIT	5.1.2.5	(99.001.853.195,00)	(24.370.556.009,92)	24,62	(33.862.676.392,71)
PEMBIAYAAN	5.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
Penggunaan SiLPA TA 2009	5.1.3.1.a	98.196.733.350,00	98.196.733.349,97	100,00	143.562.038.073,54
Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
Pinjaman Dalam Negeri		-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman	5.1.3.1.b	150.000.000,00	1.589.781.128,00	1.059,85	50.000.000,00
Penerimaan Piutang Daerah	5.1.3.1.c	1.916.772.000,00	318.363.751,00	16,61	140.700.121,00
<i>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</i>		100.263.505.350,00	100.104.878.228,97	99,84	143.752.738.194,54
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1)	-	-	-	5.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.2)	500.000.000,00	-	-	5.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.1.3.2.3)	761.652.155,00	761.652.154,88	100,00	1.193.328.451,86
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
<i>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</i>		1.261.652.155,00	761.652.154,88	60,37	11.693.328.451,86
PEMBIAYAAN NETTO		99.001.853.195,00	99.343.226.074,09	100,34	132.059.409.742,68
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TA 2010	5.1.3.3	-	74.972.670.064,17		98.196.733.349,97

WALIKOTA YOGYAKARTA,

H. HERRY ZUDianto

APBD 2011 (Dalam Jutaan Rupiah)		
Uraian	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman
Pendapatan	Rp 791.827	Rp 1.311.474
PAD	Rp 53.752	Rp 226.723
Pajak daerah	Rp 5.854	Rp 142.698
Retribusi daerah	Rp 8.451	Rp 33.164
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp 4.936	Rp 11.036
Lain-lain PAD yang sah	Rp 34.511	Rp 39.825
Pendapatan Transfer	Rp 716.344	Rp 1.062.766
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rp 522.277	Rp 753.889
Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 29.592	Rp 76.229
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Rp 305	Rp 3.089
Dana alokasi umum	Rp 444.044	Rp 631.921
Dana alokasi khusus	Rp 48.337	Rp 42.650
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Rp 164.558	Rp 206.591
Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp 206.591
Dana Penyesuaian	Rp 164.558	Rp -
Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 29.509	Rp 102.285
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 29.509	Rp 94.205
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp 8.080
Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp 21.731	Rp 21.985
Pendapatan Hibah	Rp 21.731	Rp 21.985
Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -
Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -
Belanja	Rp 778.747	Rp 1.238.719
Belanja Operasi	Rp 672.059	Rp 1.142.119
Belanja Pegawai	Rp 520.609	Rp 860.573
Belanja Barang	Rp 100.693	Rp 214.563
Belanja Bunga	Rp 52	Rp 62
Belanja Subsidi	Rp -	Rp -
Belanja Hibah	Rp 16.841	Rp 36.819
Belanja Bantuan sosial	Rp 11.347	Rp 30.102
Belanja Bantuan Keuangan	Rp 22.518	Rp -
Belanja Modal	Rp 105.605	Rp 96.111
Tanah	Rp 5.366	Rp 16.553
Peralatan dan Mesin	Rp 22.433	Rp 12.746
Gedung dan Bangunan	Rp 25.784	Rp 25.009
Jalan, irigasi dan jaringan	Rp 46.142	Rp 41.563
Aset tetap lainnya	Rp 5.880	Rp 241
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -
Aset lainnya	Rp -	Rp -
Belanja tidak terduga	Rp 1.083	Rp 489
Belanja tidak terduga	Rp 1.083	Rp 489
Transfer	Rp 1.873	Rp 39.336
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	Rp 968	Rp 19.693
Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa	Rp 905	Rp -
Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa	Rp -	Rp -
Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa	Rp -	Rp 19.643
Belanja dan Transfer	Rp 780.620	Rp 1.278.055
Pembiayaan	Rp 59.563	Rp 105.276
Penerimaan Pembiayaan	Rp 64.590	Rp 111.414
SiLPA TA sebelumnya	Rp 62.691	Rp 111.414
Pencairan dana cadangan	Rp -	Rp -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Rp -	Rp -
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp 1.899	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 5.026	Rp 6.138
Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp 4.935	Rp 6.000
Pembayaran Pokok Utang	Rp 91	Rp 138
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Rp -	Rp -
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Rp -	Rp -
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	Rp -	Rp -

APBD 2011 (Dalam Jutaan Rupiah)			
Uraian	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kota Yogyakarta
Pendapatan	Rp 1.180.547	Rp 965.826	Rp 951.681
PAD	Rp 128.896	Rp 54.462	Rp 228.871
Pajak daerah	Rp 35.069	Rp 8.130	Rp 120.458
Retribusi daerah	Rp 17.799	Rp 11.384	Rp 34.408
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp 7.291	Rp 4.259	Rp 10.121
Lain-lain PAD yang sah	Rp 68.738	Rp 30.689	Rp 63.883
Dana Perimbangan	Rp 717.123	Rp 667.005	Rp 500.614
DBH	Rp 46.143	Rp 35.839	Rp 62.722
DAU	Rp 625.061	Rp 572.009	Rp 436.130
DAK	Rp 45.919	Rp 59.157	Rp 1.762
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 334.527	Rp 244.359	Rp 222.197
Hibah	Rp -	Rp -	Rp 3.345
Dana darurat	Rp -	Rp -	Rp -
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	Rp 53.144	Rp 30.917	Rp 60.273
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp 102.331	Rp 185.897	Rp 125.374
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	Rp 37.649	Rp 27.545	Rp -
Lain-lain	Rp 141.404	Rp -	Rp 33.205
Belanja	Rp 1.151.886	Rp 938.850	Rp 932.019
Belanja Tidak Langsung	Rp 817.127	Rp 687.032	Rp 608.011
Belanja Pegawai	Rp 723.599	Rp 615.375	Rp 515.296
Belanja Bunga	Rp 52	Rp 43	Rp 235
Belanja Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -
Belanja Hibah	Rp 23.889	Rp 9.387	Rp 59.496
Belanja Bantuan sosial	Rp 36.168	Rp 16.454	Rp 31.532
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	Rp 1.906	Rp 3.181	Rp -
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	Rp 30.447	Rp 41.797	Rp -
Belanja tidak terduga	Rp 1.066	Rp 794	Rp 1.453
Belanja Langsung	Rp 334.759	Rp 251.818	Rp 324.007
Belanja Pegawai	Rp 63.518	Rp 36.052	Rp 92.852
Belanja Barang dan jasa	Rp 151.824	Rp 104.745	Rp 172.005
Belanja Modal	Rp 119.417	Rp 111.021	Rp 59.151
Pembiayaan Netto	Rp 30.993	Rp 87.214	Rp 75.782
Penerimaan Pembiayaan	Rp 35.108	Rp 91.877	Rp 76.344
SiLPA TA sebelumnya	Rp 35.108	Rp 90.266	Rp 74.973
Pencairan dana cadangan	Rp -	Rp -	Rp -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp -	Rp 1.611	Rp 1.371
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 4.115	Rp 4.663	Rp 562
Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp 4.000	Rp 3.000	Rp -
Pembayaran Pokok Utang	Rp 115	Rp 86	Rp 562
Pemberian Pinjaman Daerah	Rp -	Rp 1.578	Rp -
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Rp -	Rp -	Rp -
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	Rp -

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI APBD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(AUDITED)

Uraian	Anggaran 2011 Rp	Realisasi 2011 Rp	Bertambah/ Berkurang Rp	%	Realisasi 2010 Rp
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	101.349.000.000,00	120.457.515.127,00	19.108.515.127,00	118,85%	78.254.579.242,00
Pendapatan Retribusi Daerah	31.725.760.317,00	34.408.438.184,00	2.682.677.867,00	108,46%	32.214.650.779,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.121.339.863,00	10.121.339.866,01	3,01	100,00%	11.031.304.700,40
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.642.117.706,00	63.883.266.468,58	3.241.148.762,58	105,34%	57.923.105.336,11
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	203.838.217.886,00	228.870.559.645,59	25.032.341.759,59	112,28%	179.423.640.057,51
PENDAPATAN TRANSFER					
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
Dana Bagi Hasil Pajak	51.162.089.069,00	60.239.274.648,00	9.077.185.579,00	117,74%	73.460.190.158,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.125.905.447,00	2.482.754.849,00	356.849.402,00	116,79%	2.124.930.562,00
Dana Alokasi Umum	436.129.821.000,00	436.129.821.000,00	-	100,00%	395.444.062.000,00
Dana Alokasi Khusus	1.761.900.000,00	1.761.900.000,00	-	100,00%	13.599.100.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	491.179.715.516,00	500.613.750.497,00	9.434.034.981,00	101,92%	484.628.282.720,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	125.374.128.480,00	125.374.128.480,00	-	100,00%	81.353.699.000,00
Dana Tunjangan Pendidikan	-	-	-	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	125.374.128.480,00	125.374.128.480,00	-	100,00%	81.353.699.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	60.317.654.000,00	60.272.804.000,00	(44.850.000,00)	99,93%	48.991.022.874,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	60.317.654.000,00	60.272.804.000,00	(44.850.000,00)	99,93%	48.991.022.874,00
Jumlah Pendapatan Transfer	676.871.497.996,00	686.260.682.977,00	9.389.184.981,00	101,39%	614.973.004.594,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	3.491.882.849,00	3.345.000.000,00	(146.882.849,00)	95,79%	13.849.280.000,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	33.780.500.000,00	33.205.190.000,00	(575.310.000,00)	98,30%	7.250.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	37.272.382.849,00	36.550.190.000,00	(722.192.849,00)	98,06%	21.099.280.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	917.982.098.731,00	951.681.432.622,59	33.699.333.891,59	103,67%	815.495.924.651,51
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	630.631.459.637,00	608.147.454.347,00	(22.484.005.290,00)	96,43%	559.146.974.048,00
Belanja Barang	188.168.122.471,00	172.004.549.017,00	(16.163.573.454,00)	91,41%	159.119.638.920,00
Belanja Bunga	235.378.950,00	235.378.946,03	(3,97)	100,00%	379.637.470,43
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	66.911.634.085,00	59.495.647.781,00	(7.415.986.304,00)	88,92%	30.530.575.535,00
Belanja Bantuan Sosial	33.056.803.116,00	31.531.674.575,00	(1.525.128.541,00)	95,39%	35.339.698.475,00
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	919.003.398.259,00	871.414.704.666,03	(47.588.693.592,97)	94,82%	784.516.524.448,43
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	2.166.750.000,00	740.936.000,00	(1.425.814.000,00)	34,20%	4.287.291.550,00
Belanja Peralatan dan Mesin	17.366.234.796,00	15.697.340.372,00	(1.668.894.424,00)	90,39%	14.321.567.817,00
Belanja Gedung dan Bangunan	14.341.022.375,00	13.385.579.965,00	(955.442.410,00)	93,34%	22.849.064.073,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	30.024.402.270,00	26.198.900.740,00	(3.825.501.530,00)	87,26%	11.046.126.965,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.576.825.000,00	2.968.496.900,00	(608.328.100,00)	82,99%	1.296.757.800,00
Belanja Aset Lainnya	309.483.940,00	159.857.100,00	(149.626.840,00)	51,65%	239.624.000,00
Jumlah Belanja Modal	67.784.718.381,00	59.151.111.077,00	(8.633.607.304,00)	87,26%	54.040.432.205,00

Uraian	Anggaran 2011 Rp	Realisasi 2011 Rp	Bertambah/ Berkurang Rp	%	Realisasi 2010 Rp
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	1.452.691.600,00	(2.547.308.400,00)	36,32%	1.309.524.008,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	1.452.691.600,00	(2.547.308.400,00)	36,32%	1.309.524.008,00
TRANSFER					
Transfer/Bagi Hasil ke Desa					
Bagi Hasil Pajak	-	-			-
Bagi Hasil Retribusi	-	-			-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-			-
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa	-	-			-
JUMLAH BELANJA	990.788.116.640,00	932.018.507.343,03	(58.769.609.296,97)	94,07%	839.866.480.661,43
SURPLUS/DEFISIT	(72.806.017.909,00)	19.662.925.279,56	92.468.943.188,56	-27,01%	(24.370.556.009,92)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SiLPA TA 2010	74.972.670.064,00	74.972.670.064,17	0,17	100,00%	98.196.733.349,97
Pencairan Dana Cadangan	-	-			-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-			-
Pinjaman Dalam Negeri	-	-			-
Penerimaan Kembali Pinjaman	1.120.000.000,00	1.212.182.072,00	92.182.072,00	108,23%	1.589.781.128,00
Penerimaan Piutang Daerah	275.000.000,00	159.282.041,00	(115.717.959,00)	57,92%	318.363.751,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	76.367.670.064,00	76.344.134.177,17	(23.535.886,83)	99,97%	100.104.878.228,97
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-		-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	-	(3.000.000.000,00)	0,00%	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	561.652.155,00	561.652.154,86	(0,14)	100,00%	761.652.154,88
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-			-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.561.652.155,00	561.652.154,86	(3.000.000.000,14)	15,77%	761.652.154,88
PEMBIAYAAN NETTO	72.806.017.909,00	75.782.482.022,31	2.976.464.113,31	104,09%	99.343.226.074,09
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TA 2011	-	95.445.407.301,87	95.445.407.301,87		74.972.670.064,17

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HARYADI SUYUTI

APBD 2012 (Dalam Jutaan Rupiah)					
Uraian	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta
Pendapatan	Rp 1.337.571	Rp 1.076.502	Rp 882.587	Rp 1.589.723	Rp 1.157.579
PAD	Rp 166.598	Rp 67.051	Rp 74.029	Rp 301.070	Rp 338.284
Pajak daerah	Rp 51.768	Rp 10.728	Rp 8.448	Rp 177.836	Rp 207.703
Retribusi daerah	Rp 20.595	Rp 19.667	Rp 11.655	Rp 34.035	Rp 38.771
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp 8.184	Rp 5.329	Rp 6.765	Rp 12.783	Rp 11.497
Lain-lain PAD yang sah	Rp 86.050	Rp 31.326	Rp 47.160	Rp 76.416	Rp 80.313
Pendapatan Transfer	Rp 1.155.535	Rp 995.903	Rp 790.237	Rp 1.281.708	Rp 808.715
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rp 885.352	Rp 799.932	Rp 612.420	Rp 946.821	Rp 602.310
Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 49.865	Rp 39.141	Rp 35.583	Rp 98.529	Rp 56.908
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Rp 4.172	Rp 2.262	Rp 353	Rp 345	Rp 2.450
Dana alokasi umum	Rp 768.035	Rp 687.944	Rp 531.104	Rp 795.709	Rp 536.467
Dana alokasi khusus	Rp 63.281	Rp 70.584	Rp 45.380	Rp 52.237	Rp 6.485
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Rp 205.720	Rp 159.564	Rp 143.946	Rp 208.487	Rp 139.338
Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Dana Penyesuaian	Rp 205.720	Rp 159.564	Rp 143.946	Rp 208.487	Rp 139.338
Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 64.463	Rp 36.407	Rp 33.871	Rp 126.401	Rp 67.067
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 64.463	Rp 36.407	Rp 33.871	Rp 112.501	Rp 67.067
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 13.900	Rp -
Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp 15.438	Rp 13.549	Rp 18.321	Rp 6.945	Rp 10.580
Pendapatan Hibah	Rp -	Rp 174	Rp 18.321	Rp 6.945	Rp -
Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Lainnya	Rp 15.438	Rp 13.375	Rp -	Rp -	Rp 10.580
Belanja	Rp 1.280.929	Rp 1.024.040	Rp 879.479	Rp 1.375.419	Rp 1.023.803
Belanja Operasi	Rp 1.140.612	Rp 859.480	Rp 730.279	Rp 1.241.689	Rp 935.210
Belanja Pegawai	Rp 894.160	Rp 734.394	Rp 593.856	Rp 979.254	Rp 668.724
Belanja Barang	Rp 181.312	Rp 113.301	Rp 101.204	Rp 203.245	Rp 223.121
Belanja Bunga	Rp 38	Rp 35	Rp 41	Rp 45	Rp 119
Belanja Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Belanja Hibah	Rp 14.952	Rp 6.031	Rp 5.808	Rp 45.171	Rp 39.430
Belanja Bantuan sosial	Rp 6.895	Rp 5.719	Rp 2.467	Rp 13.975	Rp 1.510
Belanja Bantuan Keuangan	Rp 43.254	Rp -	Rp 26.903	Rp -	Rp 2.307
Belanja Modal	Rp 140.107	Rp 164.361	Rp 147.831	Rp 132.536	Rp 88.336
Tanah	Rp 1.723	Rp 5.684	Rp 2.462	Rp 10.616	Rp 1.320
Peralatan dan Mesin	Rp 30.385	Rp 21.465	Rp 24.117	Rp 40.383	Rp 24.677
Gedung dan Bangunan	Rp 36.129	Rp 79.424	Rp 34.554	Rp 46.567	Rp 28.930
Jalan, irigasi dan jaringan	Rp 63.582	Rp 55.303	Rp 83.520	Rp 33.358	Rp 30.568
Aset tetap lainnya	Rp 8.288	Rp 2.484	Rp 3.179	Rp 1.612	Rp 2.597
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Aset lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 244
Belanja tidak terduga	Rp 210	Rp 198	Rp 1.370	Rp 1.194	Rp 257
Belanja tidak terduga	Rp 210	Rp 198	Rp 1.370	Rp 1.194	Rp 257
Transfer	Rp 1.949	Rp 49.119	Rp 2.211	Rp 45.982	Rp -
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	Rp 1.201	Rp 1.940	Rp 1.080	Rp 23.825	Rp -
Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa	Rp 748	Rp 1.857	Rp 1.131	Rp -	Rp -
Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa	Rp -	Rp 45.321	Rp -	Rp 22.157	Rp -
Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Belanja dan Transfer	Rp 1.282.878	Rp 1.073.158	Rp 881.690	Rp 1.421.401	Rp 1.023.803
Pembiayaan	Rp 49.415	Rp 107.427	Rp 66.478	Rp 120.758	Rp 90.746
Penerimaan Pembiayaan	Rp 62.687	Rp 115.388	Rp 72.791	Rp 138.695	Rp 96.108
SiLPA TA sebelumnya	Rp 59.581	Rp 114.190	Rp 70.770	Rp 138.695	Rp 95.445
Pencairan dana cadangan	Rp -	Rp -	Rp 2.022	Rp -	Rp -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp 3.106	Rp 1.198	Rp -	Rp -	Rp 663
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 13.271	Rp 7.962	Rp 6.313	Rp 17.936	Rp 5.362
Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp 13.156	Rp 6.500	Rp 6.222	Rp 17.799	Rp 4.000
Pembayaran Pokok Utang	Rp 115	Rp 378	Rp 91	Rp 138	Rp 362
Pemberian Pinjaman Daerah	Rp -	Rp 1.084	Rp -	Rp -	Rp 1.000
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

APBD 2013 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Kab. Kulon Progo	Kota Yogyakarta
Pendapatan	Rp 1.003.179	Rp 1.309.580
PAD	Rp 95.992	Rp 383.052
Pajak daerah	Rp 8.696	Rp 227.749
Retribusi daerah	Rp 14.987	Rp 40.339
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp 8.253	Rp 12.596
Lain-lain PAD yang sah	Rp 64.056	Rp 102.368
Pendapatan Transfer	Rp 886.199	Rp 914.763
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rp 681.455	Rp 658.771
Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 33.215	Rp 52.704
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Rp 367	Rp 2.634
Dana Alokasi Umum	Rp 594.979	Rp 597.212
Dana Alokasi Khusus	Rp 52.894	Rp 6.221
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Rp 163.769	Rp 177.684
Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -
Dana Penyesuaian	Rp 163.769	Rp 177.684
Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 40.975	Rp 78.308
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 40.975	Rp 78.308
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -
Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp 20.989	Rp 11.765
Pendapatan Hibah	Rp 20.989	Rp -
Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -
Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp 11.765
Belanja	Rp 963.446	Rp 1.232.912
Belanja Operasi	Rp 839.661	Rp 1.065.813
Belanja Pegawai	Rp 650.493	Rp 714.061
Belanja Barang	Rp 105.082	Rp 308.922
Belanja Bunga	Rp 30	Rp 75
Belanja Subsidi	Rp -	Rp -
Belanja Hibah	Rp 38.152	Rp 34.288
Belanja Bantuan sosial	Rp 14.057	Rp 6.045
Belanja Bantuan Keuangan	Rp 31.847	Rp 2.421
Belanja Modal	Rp 123.314	Rp 167.080
Tanah	Rp 6.609	Rp 25.974
Peralatan dan Mesin	Rp 15.922	Rp 42.075
Gedung dan Bangunan	Rp 26.221	Rp 57.268
Jalan, irigasi dan jaringan	Rp 73.779	Rp 39.085
Aset tetap lainnya	Rp 782	Rp 2.024
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -
Aset lainnya	Rp -	Rp 654
Belanja tidak terduga	Rp 471	Rp 19
Belanja tidak terduga	Rp 471	Rp 19
Transfer	Rp 1.141	Rp -
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	Rp 733	Rp -
Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa	Rp 409	Rp -
Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa	Rp -	Rp -
Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa	Rp -	Rp -
Belanja dan Transfer	Rp 964.588	Rp 1.232.912
Pembiayaan	Rp 62.881	Rp 226.709
Penerimaan Pembiayaan	Rp 68.613	Rp 227.223
SiLPA TA sebelumnya	Rp 67.375	Rp 224.522
Pencairan dana cadangan	Rp -	Rp -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Rp -	Rp 2.698
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp 1.239	Rp 2
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 5.732	Rp 514
Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp 5.641	Rp -
Pembayaran Pokok Utang	Rp 91	Rp 514
Pemberian Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Rp -	Rp -
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	Rp -	Rp -



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2013 DAN 31 Desember 2012

Audited

U R A I A N	CaLK	Anggaran TA 2013 (Rp)		Realisasi TA 2013 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2012 (Rp)
PENDAPATAN	511	1.503.865.465.664,67		1.520.302.695.802,31	101,09	1.337.570.725.382,56
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.	205.407.209.787,07	13,66%	224.197.864.331,31	109,15	166.597.778.028,56
Pajak Daerah	1.a)	64.487.000.000,00		83.232.017.500,20	129,07	51.768.352.231,50
Retribusi Daerah	1.b)	26.671.104.494,00		27.116.286.436,00	101,67	20.595.098.751,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.c)	9.508.075.667,00		9.508.075.666,16	100,00	8.184.263.102,01
Lain-lain PAD	1.d)	104.741.029.626,07		104.341.484.728,95	99,62	86.050.063.944,05
PENDAPATAN TRANSFER	2	1.258.229.035.877,60	83,67%	1.262.574.142.571,00	100,35	1.155.535.427.354,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana P	2.a)	938.968.131.005,00		938.492.077.341,00	99,95	885.352.411.354,00
Dana Bagi Hasil Pajak	2.a).1)	32.602.492.211,00		31.655.243.100,00	-	49.864.791.011,00
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Paja	2.a).2)	4.358.124.794,00		4.829.320.241,00	110,81	4.171.586.343,00
Dana Alokasi Umum	2.a).3)	854.810.634.000,00		854.810.634.000,00	100,00	768.034.584.000,00
Dana Alokasi khusus	2.a).4)	47.196.880.000,00		47.196.880.000,00	100,00	63.281.450.000,00
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	2.b)	246.782.676.000,00		246.782.676.000,00	100,00	205.719.691.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2.b).1)					0,00
Dana Tunjangan Pendidikan	2.b).2)	246.782.676.000,00		246.782.676.000,00	100,00	205.719.691.000,00
lainnya		0,00				
Transfer Pemerintah Propinsi	2.c)	72.478.228.872,60		77.299.389.230,00	106,65	64.463.325.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2.c).1)	72.478.228.872,60		77.299.389.230,00	106,65	64.463.325.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAI	3	40.229.220.000,00	0,77%	33.530.688.900,00	83,35	15.437.520.000,00
Pendapatan Hibah	3.a)	11.605.280.000,00		4.931.948.900,00	#DIV/0!	-
Pendapatan Dana Darurat	3.b)				-	
Pendapatan Lainnya	3.c)	28.623.940.000,00		28.598.740.000,00	99,91	15.437.520.000,00
BELANJA	512	1.570.168.261.924,38		1.387.719.170.740,07	88,38	1.282.878.383.296,48
BELANJA OPERASI	1	1.345.198.933.881,00	77,38%	1.204.273.540.264,98	89,52	1.140.612.229.886,48
Belanja Pegawai	1.a)	1.040.922.484.824,00		947.096.405.053,00	90,99	894.160.129.295,00
Belanja Barang dan Jasa	1.b)	222.764.890.857,00		188.170.397.306,06	84,47	181.312.175.634,00
Belanja Bunga	1.c)	51.506.900,00		24.051.602,92	46,70	37.873.282,48
Belanja Subsidi	1.d)					
Belanja Hibah	1.e)	22.932.379.800,00		19.101.477.840,00	83,29	14.952.495.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.f)	18.003.050.000,00		15.778.200.000,00	87,64	6.895.326.112,00
Belanja Bantuan Keuangan	1.g)	40.524.621.500,00		34.103.008.463,00	84,15	43.254.230.563,00
BELANJA MODAL	2	196.988.137.204,00	0,36%	183.269.840.475,09	93,04	140.106.752.810,00
Belanja Tanah	2.a)	4.892.652.400,00		3.571.227.380,00	72,99	1.723.046.790,00
Belanja Peralatan dan Mesin	2.b)	35.784.526.319,00		28.204.936.652,00	78,82	30.384.563.920,00
Belanja Gedung dan Bangunan	2.c)	41.415.647.503,00		40.669.661.505,91	98,20	36.129.061.430,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Bangunan	2.d)	106.977.976.407,00		103.788.960.292,18	97,02	63.581.718.620,00
Belanja Aset tetap lainnya	2.e)	7.917.334.575,00		7.035.054.645,00	88,86	8.288.362.050,00
Belanja Aset lainnya	2.f)			-		-

U R A I A N	CaLK	Anggaran TA 2013 (Rp)		Realisasi TA 2013 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2012 (Rp)
BELANJA TAK TERDUGA	3	25.912.008.239,38	1,93%	175.790.000,00	0,68	210.218.000,00
Belanja Tak terduga		25.912.008.239,38		175.790.000,00	0,68	210.218.000,00
TRANSFER KE KAB/KOTA/DESA	4	2.069.182.600,00	0,09%	0,00	-	1.949.182.600,00
Bagi Hasil Pajak	4.a)	1.201.463.600,00	72,22%	0,00	-	1.201.463.600,00
Bagi Hasil Retribusi	4.b)	867.719.000,00	#REF!	0,00	-	747.719.000,00
Surplus Defisit		(66.302.796.259,71)		132.583.525.062,24	(199,97)	54.692.342.086,08
Pembiayaan	513					
PENERIMAAN DAERAH	1	113.940.333.809,71		110.873.724.177,71	97,31	62.686.562.399,89
Penggunaan SILPA		104.107.673.809,71		104.107.673.809,71	100,00	59.581.049.143,07
Pencairan dana Cadangan						
Penjualan Kekayaan daerah yang dispisahkan						
Penerimaan Pinjaman daerah						
Penerimaan pemberian Pinjaman						
Penerimaan kembali dana bergulir		9.832.660.000,00		6.766.050.368,00	68,81	3.105.513.256,82
PENGELUARAN DAERAH	2	47.637.537.550,00		39.062.286.226,26	82,00	13.271.230.676,26
Pembentukan Dana Cadangan						
Penyertaan (Investasi) Pemda	2.a)	37.074.500.000,00		31.074.500.000,00	83,82	13.156.000.000,00
Pembayaran Pokok Hutang	2.b)	181.037.550,00		181.036.226,26	100,00	115.230.676,26
Pemberian Pinjaman	2.c)	10.382.000.000,00		7.806.750.000,00		
Pembiayaan Netto		66.302.796.259,71		71.811.437.951,45	108,31	49.415.331.723,63
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN		0,00		204.394.963.013,69		104.107.673.809,71



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SKPD : 1.20.05.03. - K P P D DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang	(%)
1	2	3	4	5	6
4.	Pendapatan	59,235,060,000.00	63,621,375,290.00	4,386,315,290.00	107.00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	59,235,060,000.00	63,621,375,290.00	4,386,315,290.00	107.00
4.1.1.	Pajak Daerah	59,225,480,000.00	63,606,037,290.00	4,380,557,290.00	107.40
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	2,780,000.00	4,648,000.00	1,868,000.00	167.19
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6,800,000.00	10,690,000.00	3,890,000.00	157.21
	JUMLAH	59,235,060,000.00	63,621,375,290.00	4,386,315,290.00	
5.	BELANJA	3,857,086,116.00	3,363,086,205.00	(493,999,911.00)	87.00
5.1.	Belanja Tidak Langsung	847,502,606.00	837,693,980.00	(9,808,626.00)	99.00
5.1.1.	Belanja Pegawai	847,502,606.00	837,693,980.00	(9,808,626.00)	98.84
5.2.	Belanja Langsung	3,009,583,510.00	2,525,392,225.00	(484,191,285.00)	84.00
5.2.1.	Belanja Pegawai	126,481,856.00	120,895,000.00	(5,586,856.00)	95.58
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1,303,261,640.00	998,565,625.00	(304,696,015.00)	76.62
5.2.3.	Belanja Modal	1,579,840,014.00	1,405,931,600.00	(173,908,414.00)	88.99
	JUMLAH	3,857,086,116.00	3,363,086,205.00	(493,999,911.00)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	55,377,973,884.00	60,258,289,085.00	4,880,315,201.00	-

Yogyakarta, 31 Desember 2013

Kepala K P P D di Kabupaten Gunungkidul DIY

Drs. JOKO PRAKOSO
NIP.19571211 198503 1 013

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 14.1 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2013
 (SETELAH KONVERSI)
 AUDITAN

(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2013 Rp	%	REALISASI 2012	KET.
1	PENDAPATAN DAERAH	1.768.438.488.349,11	1.899.525.636.838,83	107,41	1.589.722.974.409,13	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	342.895.307.197,81	449.270.304.864,83	131,02	301.069.539.284,13	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	223.900.000.000,00	274.628.955.500,77	122,66	177.835.870.150,47	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	26.304.202.320,00	48.001.679.730,61	182,49	34.034.969.787,28	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	14.355.000.000,00	15.551.529.372,17	108,34	12.783.121.935,56	
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	78.336.104.877,81	111.088.140.261,29	141,81	76.415.577.410,82	
1.2	Pendapatan Transfer	1.425.543.181.151,30	1.442.483.146.251,00	101,19	1.281.708.216.150,00	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	992.417.480.016,00	992.782.430.677,00	100,04	946.821.049.150,00	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	47.223.707.347,00	46.908.099.802,00	99,33	95.851.408.966,00	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	0,00	348.339.971,00	0,00	345.477.415,00	
1.2.1.3	Dana Bagi Hasil Cukai	2.780.530.669,00	3.112.748.904,00	111,95	2.678.005.769,00	
1.2.1.4	Dana Alokasi Umum	891.589.912.000,00	891.589.912.000,00	100,00	795.708.767.000,00	
1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus	50.823.330.000,00	50.823.330.000,00	100,00	52.237.390.000,00	
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	278.966.095.880,00	286.912.555.070,00	102,85	208.486.544.000,00	
1.2.2.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	246.870.770.880,00	254.817.230.070,00	103,22	208.486.544.000,00	
1.2.2.2	Dana Insentif Khusus	32.095.325.000,00	32.095.325.000,00	100,00	0,00	
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	154.159.605.255,30	162.788.160.504,00	105,60	126.400.623.000,00	
1.2.3.1	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	125.109.605.255,30	134.451.960.504,00	107,47	112.500.623.000,00	
1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	29.050.000.000,00	28.336.200.000,00	97,54	13.900.000.000,00	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	7.772.185.723,00		6.945.218.975,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	1.016.000.000,00	0,00	6.945.218.975,00	
1.3.2	Pendapatan dari piutang PBB-P2 yg belum diserahterimakan	0,00	6.756.185.723,00	0,00	6.756.185.723,00	
2	BELANJA	1.946.380.363.064,13	1.693.528.297.005,79	87,01	1.421.401.170.875,33	
2.1	BELANJA OPERASI	1.604.540.910.957,21	1.420.339.683.204,62	88,52	1.241.689.260.072,06	
2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	1.161.524.368.836,40	1.034.255.811.435,98	89,04	979.253.621.029,36	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.125.006.794,81	227.028.261.886,61	90,77	203.244.891.404,66	
2.1.3	Belanja Bunga	144.000.000,00	28.750.905,83	19,97	45.273.123,03	
2.1.4	Belanja Subsidi	34.745.931.658,00	19.518.562.420,00	56,18	0,00	
2.1.5	Belanja Hibah	129.419.872.168,00	117.707.233.556,20	90,95	45.170.865.015,00	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	28.581.731.500,00	21.801.063.000,00	76,28	13.974.609.500,00	
2.3	BELANJA MODAL	260.990.406.145,00	206.859.865.136,47	79,26	132.536.252.044,00	
2.3.1	Belanja Tanah	58.597.146.055,00	37.115.234.370,00	63,34	10.616.365.435,00	
2.3.4	Belanja Peralatan dan Mesin	52.095.617.295,00	45.628.593.658,40	87,59	33.358.242.745,00	
2.3.2	Belanja Gedung dan Bangunan	86.406.447.175,00	73.350.676.738,77	84,89	40.382.726.115,00	
2.3.3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	54.599.042.470,00	49.490.108.162,00	90,64	46.566.932.866,00	
2.3.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	9.292.153.150,00	1.275.252.207,00	13,72	1.611.984.883,00	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.395.768.134,93	0,00	0,00	1.193.672.563,00	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	12.395.768.134,93	0,00	0,00	1.193.672.563,00	
2.4	TRANSFER	68.453.277.826,99	66.328.748.665,00	96,90	45.981.986.196,28	
2.4.1	Transfer bagi Hasil ke Desa	68.453.277.826,99	66.328.748.665,00	96,90	45.981.986.196,28	
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemdes	33.879.052.826,99	33.366.158.150,00	98,49	23.824.947.196,28	
2.4.1.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemdes	34.574.225.000,00	32.962.590.515,00	95,34	22.157.039.000,00	
	Surplus/(Defisit)	(177.941.874.715,02)	205.997.339.833,04	(115,77)	168.321.803.533,80	
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Sebelumnya	289.079.874.715,02	289.079.874.715,22	100,00	138.694.508.682,82	
	Jumlah	289.079.874.715,02	289.079.874.715,22	100,00	138.694.508.682,82	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.2	Penyertaan Modal	111.000.000.000,00	63.580.000.000,00	57,28	17.798.692.573,00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	138.000.000,00	137.744.928,40	99,82	137.744.928,40	
	Jumlah	111.138.000.000,00	63.717.744.928,40	57,33	17.936.437.501,40	
	Pembiayaan Netto	177.941.874.715,02	225.362.129.786,82	126,66	120.758.071.181,42	
	SILPA	0,00	431.359.469.619,66		289.079.874.715,22	

BUPATI SLEMAN,

 SRI PURNOMO